



Laporan Kinerja **2018**

Balai Besar POM di Mataram

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vii
Pengantar	ix
Ringkasan Esekutif	x

BAB 1

Pendahuluan

A. Gambaran Umum	1
Aspek Strategis Organisasi	3
Permasalahan	9
B. Struktur Organisasi	11
Struktur Organisasi BBPOM di Mataram	11
Struktur Organisasi Loka POM Bima	12
C. Analisis Lingkungan Strategis	13
Kondisi Lingkungan Internal	13
Anggaran Tahun 2018	14
Profil Pegawai	14
Kondisi Lingkungan Eksternal	15
Demografi Provinsi NTB	15
Profil Sarana di Provinsi NTB	16

BAB 2

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	24

	A. Capaian Kinerja Organisasi	30
	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS1	33
	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS2	50
	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS3	52
BAB 3	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS4	55
Akuntabilitas Kinerja	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS5	65
	Analisis Akuntabilitas Kinerja SS6	69
	B. Realisasi Anggaran	72
	Analisis Efisiensi Kegiatan	75

BAB 4	A. Kesimpulan	79
Penutup	B. Saran	83

Lampiran	Lampiran	84
-----------------	-----------------	----

DAFTAR TABEL

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Tabel 2.1. Indikator dan Target Sasaran Strategis 1	19
Tabel 2.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis 2	20
Tabel 2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis 3	21
Tabel 2.4. Indikator dan Target Sasaran Strategis 4	22
Tabel 2.5. Indikator dan Target Sasaran Strategis 5	22
Tabel 2.6. Indikator dan Target Sasaran Strategis 6	23
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 OTK Lama	25
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 OTK Baru	26

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018	30
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017	31
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya	32
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 1 BBPOM di Mataram Tahun 2018	33
Tabel 3.5 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS1	34
Tabel 3.6 Profil Hasil Pengujian Obat Tahun 2016-2018	37
Tabel 3.7 Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Tahun 2016-2018	40
Tabel 3.8 Profil Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2016-2018	44
Tabel 3.9 Profil Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Tahun 2016-2018	46
Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018	50
Tabel 3.11 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS2	52
Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018	52

BAB 3Akuntabilitas
Kinerja

Tabel 3.13 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS3	54
Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018	55
Tabel 3.15 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS4	56
Tabel 3.16 Jumlah Rekomendasi dan tindak lanjut tahun 2018	64
Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2018	65
Tabel 3.18 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS5	68
Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018	69
Tabel 3.20 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS6	71
Tabel 3.21 Realisasi anggaran berdasarkan capaian realisasi Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2018	73
Tabel 3.22 Efisiensi Kegiatan Tahun 2018	77

DAFTAR GAMBAR

BAB 1	Pendahuluan	<p>Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Mataram 11</p> <p>Gambar 1.2. Kelompok Tugas BBPOM Di Mataram 12</p> <p>Gambar 1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bima 12</p> <p>Gambar 1.4. Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Provinsi NTB 16</p> <p>Gambar 1.5. Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian di Provinsi NTB 16</p>
BAB 3	Akuntabilitas Kinerja	<p>Gambar 3.1 Profil Target, Realisasi dan Capaian Indikator IPOM Tahun 2015-2018 36</p> <p>Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Indikator IPOM BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya 36</p> <p>Gambar 3.3 Profil Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang MS tahun 2016-2019 38</p> <p>Gambar 3.4 Perbandingan capaian indikator Persentase Obat yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya 39</p> <p>Gambar 3.5 Profil Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Obat Tradisional MS tahun 2016-2019 41</p> <p>Gambar 3.6 Perbandingan capaian indikator Persentase Obat Tradisional yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya 42</p> <p>Gambar 3.7 Profil Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Kosmetik MS Tahun 2016-2019 44</p> <p>Gambar 3.8. Perbandingan capaian indikator Persentase Kosmetik yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya 45</p> <p>Gambar 3.9 Profil Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2016-2019 46</p> <p>Gambar 3.10 Perbandingan capaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya 47</p> <p>Gambar 3.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Persentase Makanan yang MS Tahun 2016-2019 48</p>

BAB 3
Akuntabilitas
Kinerja

Gambar 3.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Persentase Makanan yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya	49
Gambar 3.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha dibidang Obat dan Makanan BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	51
Gambar 3.14 Perbandingan Target, Realisasi, % Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	53
Gambar 3.15 Perbandingan Target, Realisasi, % Capaian Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	58
Gambar 3.16 Perbandingan Target, Realisasi, % Capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	60
Gambar 3.17 Perbandingan Target, Realisasi, % Capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	61
Gambar 3.18 Perbandingan Target, Realisasi, % Capaian keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu di BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	63
Gambar 3.19 Perbandingan Target, Realisasi, % Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya	64
Gambar 3.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Persentase Perkara hingga tahap II	67
Gambar. 3.21 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Persentase Perkara hingga tahap II BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya	68
Gambar 3.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram	69
Gambar 3.23 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	84
Renstra Balai Besar POM di Mataram Tahun 2015-2019	
Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018	86
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018	88
Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Mataram	82
Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai Besar POM di Mataram	84
Lampiran 6 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Mataram	88



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Kepala Balai Besar POM Di Mataram
Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya telah memberikan kemudahan dan perlindungan. Walaupun ditengah-tengah bencana yang menimpa Pulau Lombok dan Sumbawa hingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, namun Balai Besar POM di Mataram tetap semangat melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan serta membantu korban gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, Balai Besar POM di Mataram bertanggungjawab melaksanakan tugas fungsi Pengawasan Obat dan Makanan secara akuntabel. Laporan Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja dan realisasi anggaran.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reuiu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di tahun keempat periode Renstra 2015 – 2019, Balai Besar POM di Mataram telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan dengan kinerja baik, dalam hal ini capaian output maupun efisiensi pelaksanaannya relatif baik.

Kiranya, tanpa kerjasama dan dukungan berbagai pihak capaian prestasi tersebut akan sulit terwujud. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lintas sektor/pemangku kepentingan terkait yang turut memberikan kontribusi dan dukungan dalam menjalankan tugas fungsi Pengawasan Obat dan Makanan yang semakin kompleks di Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata, harapan kami Laporan Kinerja Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Kepala Balai Besar POM di Mataram,



Ringkasan Esekutif

Balai Besar POM di Mataram sebagai UPT Badan POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala Badan POM RI dan para pemangku kepentingan (stakeholder) Balai Besar POM di Mataram, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Mataram dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan sesuai Renstra BBPOM di Mataram 2015-2019 telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yaitu SS I "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat", tercapai dengan kriteria Cukup (98,16%), SS 2 "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" tercapai dengan kriteria Cukup (82,88%), SS 3 "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" tercapai dengan kriteria Memuaskan (104,42 %), SS 4 "Meningkatnya efektivitas pengawasan

Obat dan Makanan berbasis risiko di Propinsi Nusa Tenggara Barat" tercapai dengan kriteria Memuaskan (115,13 %), SS 5 "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" tercapai dengan kriteria Baik (100,00 %), dan SS 6 "Terwujudnya Reformasi Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB Badan POM RI 2015 - 2019" tercapai dengan kriteria Cukup (97,13 %). Justifikasi capaian sasaran ini dijelaskan pada Bab III.

Pencapaian ke 6 sasaran strategis tersebut diukur dengan 15 (limabelas) indikator. Dari 15 indikator, 6 diantaranya melampaui target yaitu Kosmetika yang memenuhi syarat (107,97%), Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Mataram (104,42%), Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi NTB (100,00%), Sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (121,09%), Sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (140,27%), Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (112,83%), Ratio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram (101,45%), Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Mataram (100,00%).

Untuk mengatasi berbagai masalah dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di NTB serta meningkatkan daya saing produk lokal, maka beberapa upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan BBPOM di Mataram pada tahun 2018 antara lain :

1. Mendukung penguatan aspek/kerangka regulasi Badan POM RI di catchment area NTB melalui Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB sebagai salah satu upaya melakukan pengawasan obat dan makanan yang *full spectrum*;
2. Mendukung penguatan aspek/kerangka kelembagaan Badan POM RI dalam pembentukan Loka POM di Bima dengan hasil hibah tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bima ke Pemerintah Pusat c.q badan POM RI yang secara simbolis diserahkan pada tanggal 17 Agustus 2018 (saat upacara 17 Agustus 2018) oleh Bupati Bima kepada Kepala BBPOM di Mataram;
3. Penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Khususnya dengan *Criminal Justice system*. Wujud dari pada penguatan koordinasi tersebut salah satunya adalah penahanan tersangka oleh Polda NTB terhadap tindak pidana Obat dan Makanan yang kasusnya ditangani oleh PPNS BBPOM di Mataram;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat timeline layanan melalui bimtek dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang melakukan registrasi produk di Badan POM ;
5. Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui Intensifikasi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
6. Mengoptimalkan peran media sosial secara positif dalam mensosialisasikan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan;
7. Mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan data pengawasan Obat dan Makanan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan;
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja melalui monitoring dan evaluasi Kontrak Kinerja dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi Kontrak Kinerja; dan
9. Meningkatkan kualitas SDM pengawas serta perkuatan sarana pendukung pengawasan Obat dan Makanan.

BAB 1.

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian diubah dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana UPT BPOM diklasifikasikan menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A, Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B, dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Untuk Provinsi NTB terdapat 1 (satu) Loka POM di Kabupaten Bima dengan wilayah kerja Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI dimana terdapat perubahan struktur organisasi UPT. Wilayah kerja BBPOM di Mataram mencakup 7 Kabupaten/Kota di luar wilayah Loka POM di Kabupaten Bima. Loka POM Bima di Kabupaten Bima bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan POM. Hubungan Balai dengan Loka POM di Kabupaten Bima bersifat koordinatif, dimana Balai Besar POM di Mataram sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima. Target kinerja Loka POM di Kabupaten Bima menjadi bagian target kinerja Balai Besar POM di Mataram.

Peraturan PerUndang-Undang (UU) yang menjadi landasan teknis tugas dan fungsi BBPOM di Mataram antara lain (i) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ; (ii) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan; (iii) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (iv) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (v) PP Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor; (vi) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; (vii) PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan (viii) PP Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Dilihat dari fungsi, BBPOM di Mataram secara garis besar memiliki empat inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*);
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) ;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan ;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

BBPOM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima sebagai UPT Badan POM memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana /fasilitas kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Aspek Strategis Organisasi

Laboratorium Unggulan dan Laboratorium Rujukan yang Terakreditasi

Sesuai SK Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.71.02.14.0931 tahun 2014 tentang Penunjukan Laboratorium Rujukan dan Unggulan di Lingkungan Badan POM, BBPOM di Mataram menjadi Laboratorium Rujukan untuk Uji BKO pada komoditi Obat Tradisional dan uji logam pada komoditi pangan. Laboratorium Unggulan Pengujian DNA Spesifik menerima Uji Rujuk dari 7 (tujuh) Balai Besar/ Balai POM. Laboratorium BBPOM di Mataram telah dilengkapi dengan alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yaitu suatu metode sintesis enzimatik DNA spesifik dengan mengamplifikasi/memperbanyak potongan sekuens DNA in vitro untuk mendeteksi DNA babi. Untuk menjamin mutu hasil pengujian BBPOM di Mataram mengimplementasikan penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan pemenuhan atau perolehan sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2005; dan OHSAS 18001:2007.

Pelayanan Publik Pengujian Sampel Pihak

Selain melakukan pengujian rutin sampel DIPA, BBPOM di Mataram menerima pelayanan pengujian Pihak Ketiga. Sebagai satu-satunya laboratorium yang bisa melakukan pengujian NAPZA, BBPOM di Mataram memiliki peran vital dalam melakukan pengujian sampel barang bukti kasus Napza dari Kepolisian di Provinsi NTB. Disamping dari Kepolisian BBPOM di Mataram juga menerima sampel Obat dan Makanan dari Dinas Kesehatan atau lintas sektor lainnya. Setiap tahun, target penerimaan PNBPN dari pengujian pihak ketiga selalu melampaui target yang ditetapkan yang secara langsung memberikan sumbangsih penerimaan PNBPN Badan POM. Khusus tahun 2018 realisasi penerimaan PNBPN mencapai 90,71%, hal ini disebabkan karena lumbok beberapa kali diguncang gempa yang berdampak pada kerusakan laboratorium dan gedung BBPOM di Mataram. Akibat kerusakan laboratorium tidak dapat dilakukan pengujian sampel rutin ataupun sampel pihak ketiga.

**Perkuatan
Jejaring Kerja
dengan
Stakeholder**

Mengingat kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Mataram tidak dapat menjadi single player, sehingga perlu memperkuat kerjasama dengan stakeholder baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan masyarakat. Jejaring kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat menjadi elemen kunci dan sangat strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini BBPOM di Mataram secara proaktif menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan baik unsur Pemerintah, Pelaku usaha, Universitas, Media dan Organisasi Masyarakat dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman dikonsumsi. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BBPOM di Mataram yaitu Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, Nota Kesepahaman Pengawasan Obat dan Makanan dengan Kabupaten/Kota, Jejaring Pengawasan Pangan Halal dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi NTB, MoU dengan beberapa Kepala Desa yang sudah memiliki Website, Kwarda Pramuka Provinsi NTB, KPID Provinsi NTB, serta Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Perkuatan jejaring ini didukung dengan terbitnya Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan, Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

**Perkuatan
Peraturan
Perundang-
Undangan**

Untuk dapat tercapainya pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien diperlukan peraturan perundang-undangan yang kuat. Sebagai Lembaga Pemerintah non Kementrian yang mempunyai tugas pengawasan tidak hanya dibutuhkan regulasi teknis tetapi juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Beberapa regulasi yang terbit dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, melalui perpres tersebut terbentuk Deputi Bidang Penindakan yang melaksanakan kebijakan di bidang penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Dengan adanya Deputi Penindakan kinerja penegakan hukum dibidang Obat dan Makanan menjadi fokus, efektif dan efisien.
2. Inpres No 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang menginstruksikan kepada kementerian Lembaga termasuk Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik; ekstrak bahan alam; suplemen kesehatan; pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Instruksi Gubernur Nomor 440/321/KUM TAHUN 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB yang menginstruksikan kepada Bupati/Walikota dan SKPD untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan Efektifitas Obat dan Makanan sesuai perundang-undangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang obat dan makanan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya peraturan poin 2,3, dan 4 diatas, pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota sudah memiliki dasar hukum yg kuat untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

**Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN)**

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. JKN diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN, penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsungnya adalah peningkatan produksi obat untuk kebutuhan JKN. Peningkatan produksi obat menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya BBPOM di Mataram dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat. Selain pengawasan mutu, BBPOM juga harus lebih instens dalam melaksanakan *farmakovigilance*.

***Sustainable
Development
Goals***

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berperan menyumbang pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan kedua *End hunger, achieve food security and improve nutrition, and promote sustainable agriculture* dan tujuan ke tiga *Ensure Healthy live and promote well-being for all of ages*.

Tujuan kedua dapat tercapai apabila produsen pangan olahan yang telah diinspeksi dan dibina menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan menjamin mutu produknya termasuk nilai nutrisi sesuai dengan kebijakan teknis yang dibuat BADAN POM/Standar Nasional Indonesia/standar internasional, sehingga keamanan dan mutu obat dan makanan yang sampai kepada masyarakat terjamin.

Sedangkan terkait tujuan 3, salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Kontribusi untuk mencapai kondisi ini adalah ketersediaan Obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan dan pangan yang aman dan bergizi. Tantangan bagi BBPOM di Mataram ke depan adalah intensifikasi pengawasan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Indonesia khususnya kawasan perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi menyebabkan Indonesia menjadi pasar potensial bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Beberapa dampak terkait isu kesehatan adalah munculnya penurunan derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Dengan perdagangan bebas akan menghadirkan berbagai macam produk yang kemungkinan juga ada resiko beredarnya obat ilegal dan makanan mengandung bahan berbahaya. Provinsi NTB merupakan salah satu destinasi wisata internasional. Hal tersebut semakin dikukuhkan dengan predikat *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon*. Arus kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara berpotensi memberikan kontribusi terhadap peredaran obat ilegal. Dampak dan efek dari globalisasi dari perdagangan bebas harus disikapi BBPOM di Mataram dengan bijaksana dengan perkuatan pengawasan post market di Provinsi NTB.

Perkembangan Teknologi dan Informasi

Perkembangan teknologi dibidang kesehatan yang semakin canggih mendorong berbagai inovasi sehingga sejumlah sarana bisa memproduksi produk obat dan makanan dalam skala besar dengan potensi peredaran yang semakin luas sampai dengan pelosok daerah. Selain perkembangan teknologi tersebut, teknologi informasi menjadi salah satu perhatian BBPOM di Mataram. Selain menawarkan manfaat kemudahan pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat, terdapat potensi negatif yang patut diwaspadai, diantaranya adalah teknologi informasi online menjadi sarana penjualan produk ilegal.

Selain teknologi informasi, sosial media juga terbukti memberikan dampak besar terhadap pembangunan opini masyarakat yang jika tidak dibina dan diarahkan, maka akan memunculkan keresahan pada masyarakat yang secara tidak langsung akan memberikan stigma negatif terhadap kinerja pengawasan Badan POM secara umum dan BBPOM di Mataram khususnya.

Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan dan berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless) sehingga perlu adanya one line command (satu komando). Hal tersebut dibutuhkan apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan adanya otonomi daerah beberapa fungsi pengawasan obat dan makanan dilimpahkan pada daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Mataram dan Loka POM di Bima berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan serta kerjasama yang baik dari para pelaku dan pemerintah daerah untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing.

Permasalahan

Dinamika Pengawasan Obat dan Makanan tidak terlepas dari peran perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang sangat mempengaruhi tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kebijakan dan strategi Pengawasan Obat dan Makanan, permasalahan strategis telah diidentifikasi dalam review Renstra 2015 -2019. Beberapa permasalahan sebagai berikut :

Peredaran Produk Ilegal. Potensi Peredaran produk ilegal semakin meningkat dan dapat melalui transaksi langsung maupun media online. Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam perdagangan bebas berakibat pada semakin berkurangnya sekat wilayah (borderless) serta menambah jalur distribusi perdagangan komoditi yang masuk dalam cakupan pengawasan baik yang legal maupun ilegal.

Peningkatan jumlah kasus obat dan makanan ilegal yang terungkap di seluruh Indonesia termasuk di wilayah NTB menunjukkan potensi peredaran produk ilegal semakin besar karena celah lemahnya pengawasan sebagai akibat tidak sebandingnya sumber tenaga PPNS dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Kemungkinan penambahan zat berbahaya pada beberapa produk ilegal juga perlu diwaspadai.

Balai Besar POM di Mataram bekerjasama dengan kepolisian melakukan penberantasan penjualan produk tanpa izin edar. Tindakan ini

dilakukan untuk mencegah adanya produk illegal/mengandung bahan berbahaya. Disamping itu, Balai Besar POM di Mataram juga bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk terlibat dalam pengawasan dengan melaporkan ke Balai Besar POM apabila menemukan paket yang mencurigakan.

Menjadi tantangan bagi BBPOM di Mataram serta Loka POM di Bima khususnya dalam mempersempit ruang gerak peredaran produk ilegal di wilayah Provinsi NTB. Selain dengan terus meningkatkan kompetensi PPNS, kerja sama dengan pihak Kepolisian khususnya pada proses penindakan serta komitmen saksi juga perlu lebih komprehensif.

Salah satu langkah yang telah ditempuh oleh Badan POM adalah penandatanganan nota kesepahaman atau MoU mengenai Peningkatan kerjasama dalam rangka Pengawasan & Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan antara Kepala Badan POM dan Kapolri. Dengan adanya MoU terjadi perkuatan koordinasi PPNS dan pihak Polri maupun lintas sektor lainnya

termasuk Badan POM dengan kepala BIN dan jaksa Agung dalam hal penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan ditingkat daerah.

Kasus Stunting di NTB. Provinsi NTB adalah salah satu Provinsi yang memiliki nilai IPM Nomor 4 terendah, salah satu faktor yang menyebabkan IPM rendah yaitu kasus stunting yang tinggi di Provinsi NTB. Berdasarkan data Jumlah kasus stunting atau anak yang mengalami pertumbuhan pendek akibat masalah kurang gizi kronis sangat tinggi di NTB, mencapai 37,2 persen.

Dikhawatirkan, bonus demografi di Indonesia pada 2030 bisa menjadi ancaman di daerah ini jika persoalan stunting tidak diperangi dari sekarang.

Kasus ini dapat diminimalisir dengan perbaikan kualitas konsumsi pangan melalui peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Penurunan stunting dapat diintervensi dari berbagai aspek diantaranya pengawasan produk fortifikasi (tepung terigu dan garam beryodium), upaya tersebut diupayakan melalui verifikasi cara produksi pangan yang baik.

Selain itu, dilakukan pengawasan terhadap produk pangan di sarana produksi maupun di sarana distribusi, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan mutu dan gizi pangan, Pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan

yang beredar melalui sampling dan pengujian. Peningkatan peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menjamin keamanan dan mutu pangan serta pemberdayaan tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku untuk membangun budaya keamanan dan mutu pangan dengan sumber daya lokal.

Lemahnya Penegakan Hukum.

Peredaran produk ilegal masih menjadi permasalahan utama di Provinsi NTB. Peredaran produk ini dilakukan melalui jalur ilegal terutama untuk produk obat dengan sasaran utama adalah anak-anak muda yang sering menyalahgunakan obat.

Tindak pidana obat dan makanan didominasi oleh peredaran produk ilegal khususnya untuk obat dan kosmetik. Peredaran obat ilegal dilakukan secara ilegal dengan sasaran para remaja dengan tujuan untuk penyalahgunaan. Peredaran obat ilegal cukup masif di wilayah NTB. Kasus tersebut telah diproses secara hukum namun sanksi terhadap para pelaku belum memberi efek jera. BBPOM di Mataram bekerja sama dengan penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberantas peredaran produk illegal.

Meningkatnya promosi dan Iklan.

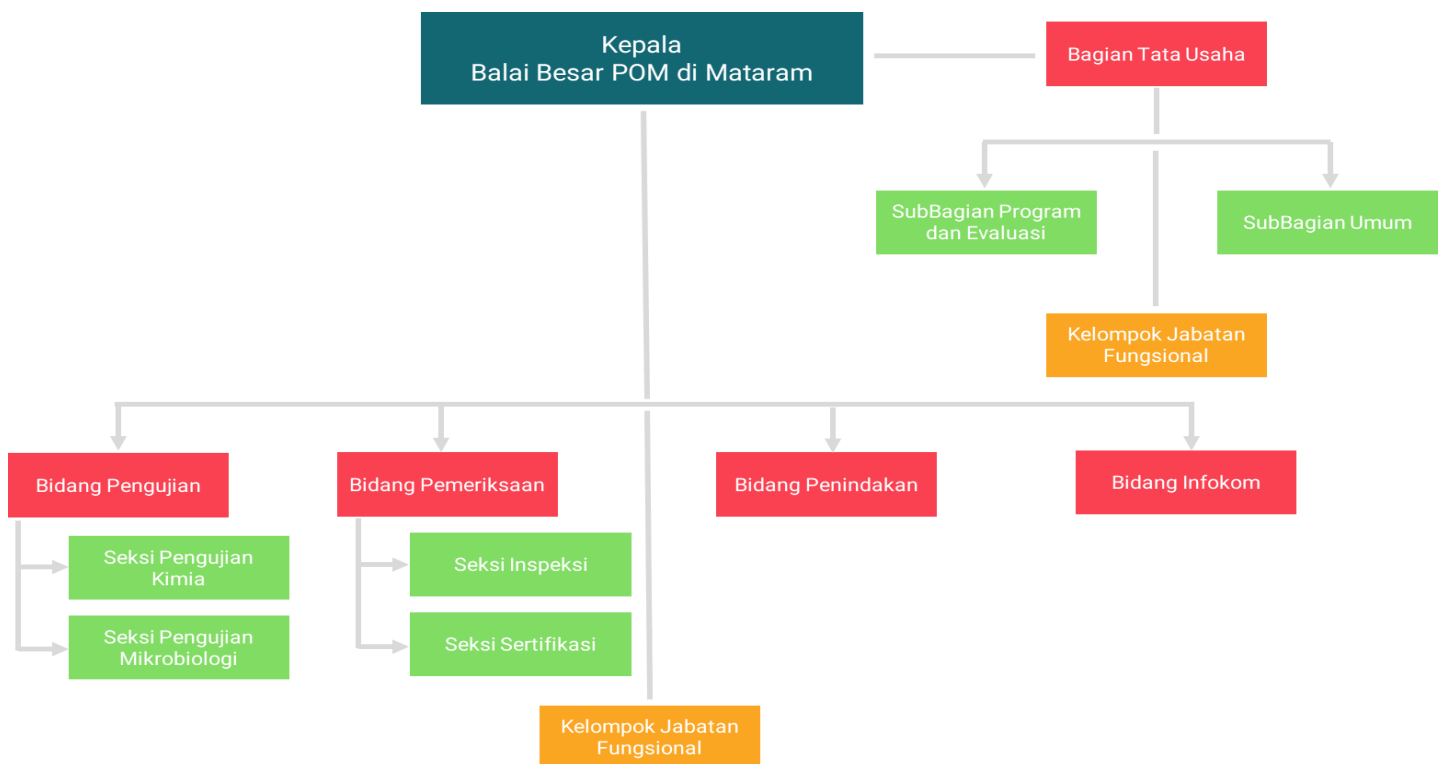
Meningkatnya promosi dan iklan berbagai produk yang cenderung berlebihan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik maupun media sosial, akan memengaruhi daya tarik atau persepsi masyarakat terhadap

produk tersebut. Informasi mengenai produk yang disampaikan melalui iklan pada umumnya berlebihan dan menyesatkan sehingga konsumen membeli produk karena pengaruh iklan bukan kebutuhan. Menyadari hal tersebut untuk melindungi konsumen

dari informasi yang menyesatkan Badan POM harus melakukan pengawasan iklan/promosi secara ketat. Di samping itu penyuluhan melalui KIE kepada masyarakat sangat penting dan terus ditingkatkan pelaksanaannya.

B. Struktur Organisasi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar POM di Mataram berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana terdapat perubahan struktur organisasi UPT Badan POM yaitu Balai Besar POM di Mataram dari 4 eselon 3 menjadi 5 eselon 3 dan terbentuknya Loka POM di Bima. Struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Mataram

Sesuai dengan struktur organisasi, secara garis besar tugas BBPOM di Mataram dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Gambar 1.2. Kelompok Tugas BBPOM Di Mataram



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bima

C. Analisis Lingkungan Strategis

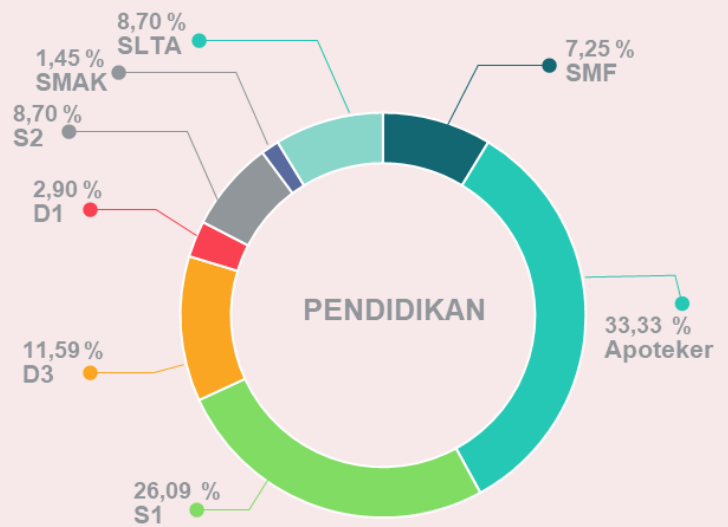
Kondisi Lingkungan Internal

No.	Infrastruktur	Spesifikasi
1	Gedung	<ul style="list-style-type: none"> Luas tanah 3.855 m² Luas bangunan 3.325 m² Status kepemilikan tanah 521 m² (sertifikat nomor 5676985) Luas Tanah 3.334 m² milik Pemda Provinsi NTB Luas Laboratorium 1.525 m² Luas Penyelenggara Administrasi 1.604 m² Luas Aula Besar 192,5 m²
2	Rumah Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Luas Tanah 250 m² Luas bangunan 200 m²
3	Loka POM di Bima	<ul style="list-style-type: none"> Luas tanah 5.000 m² masih proses penerbitan sertifikat hibah dari Pemda Kabupaten Bima Luas bangunan 416 m²
4	Sumber Air	<ul style="list-style-type: none"> PDAM dan sumur
5	Sumber Listrik	<ul style="list-style-type: none"> 187,5 KVA (dari dua induk) 100 KVA (generator) 16.5 KVA (Loka POM di Bima)
6	Kendaraan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> kendaraan roda empat, 11 unit (6 unit mobil operasional, 4 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil penindakan) kendaraan roda dua, 4 unit
7	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 3 line telepon 0370) 622297, (0370) 621926 dan FAX (0370) 628033 1 line telepon (0370) 6647512 (Loka POM di Bima)
8	Email	<ul style="list-style-type: none"> bpom_mataram@pom.go.id bpom_mtrm@yahoo.com balai_mataram@yahoo.co.id lokapomdikabbima@gmail.com (Loka POM di Bima)
9	Layanan internet (24 jam)	<ul style="list-style-type: none"> VPN 2 Mbps Indihome 2 line masing-masing 20 Mbps Indihome 1 line masing-masing 100 Mbps
10	Laboratorium Terakreditasi	Laboratorium telah terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu di laboratorium sesuai ISO/IEC 17025 : 2005 dengan ruang lingkup akreditasi pengujian Obat dan Makanan.
11	QMS ISO 9001:2015	BBPOM di Mataram telah menerapkan QMS sejak tahun 2011
12	OHSAS 18001:2007	BBPOM di Mataram telah menerapkan sitem manajemen K3 sejak tahun 2013

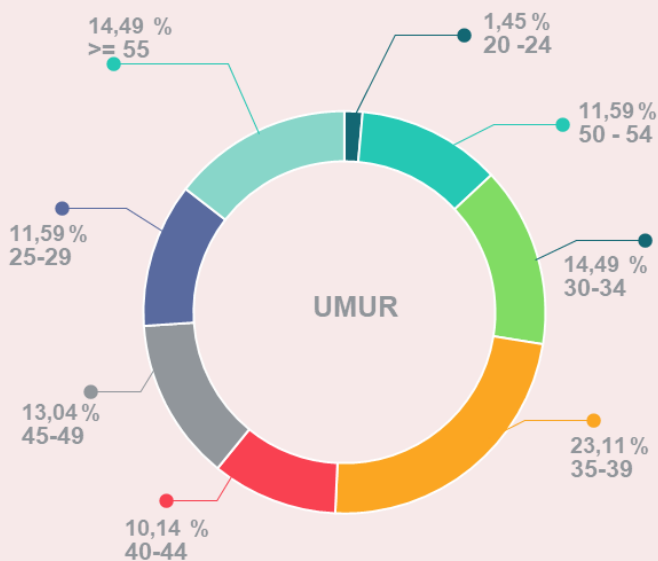
Anggaran Tahun 2018

No.	Jenis Belanja	Pagu DIPA	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pegawai	9.583.238.000	9.283.097.992	96,87
2	Barang	16.621.611.000	12.785.661.382	76,92
3	Modal	9.896.987.000	9.507.201.105	96,06
Total		36.101.836.000	31.876.100.487	87,46

Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan



UMUR



Profil Pegawai Berdasarkan Umur

Kondisi Lingkungan Eksternal

No.	Geografis	Keterangan
1	Luas Daratan	20.153,15 km ² (1,05% dari luas Indonesia)
2	Luas Perairan	29.154,04 km ²
3	Pulau	<ul style="list-style-type: none"> • pulau Lombok dengan luas 4.738,70 km² (23,51% luas Provinsi NTB) • pulau Sumbawa dengan luas 15.414,45 km² (76,49% luas Provinsi NTB) • pulau kecil-kecil lainnya
4	Wilayah administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima) • 2 Kota (Mataram dan Bima) • 116 Kecamatan • 1.141 Desa/Kelurahan

Demografi Provinsi NTB

Jumlah Penduduk NTB	4.955.578 jiwa 2.405.080(48,53%) laki-laki 2559498 (51,47%) perempuan Angkatan kerja 2.189.946 jiwa Pendudukan yang bekerja 2.147.228 orang (43,33%)
Laju Pertumbuhan	2010-2016 sebesar 1.36 % *) data BPS 2010-2016
Angka Melek (diatas 15 Tahun)	87.06 %
Pengeluaran Perkapita	Rp. 9.877.000
Laju Pertumbuhan Pendapatan	12,32 %*) data BPS 2009-2013

Profil Sarana di Provinsi NTB

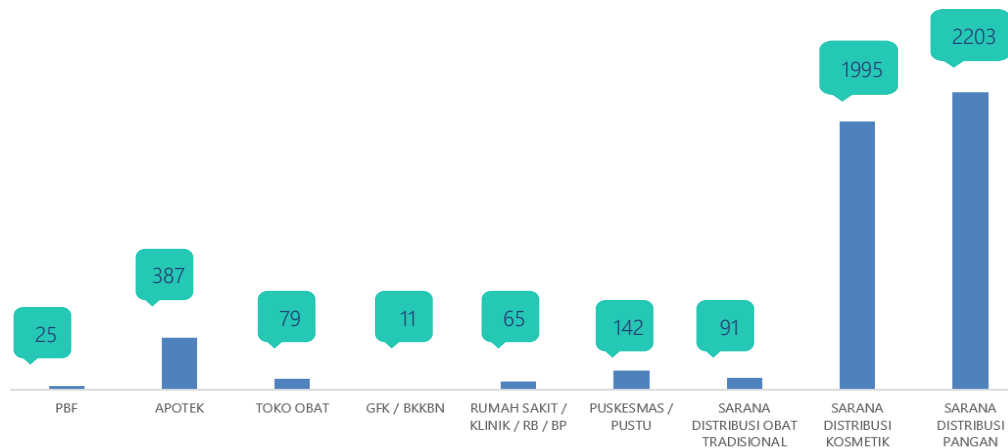
Jumlah sarana produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Provinsi NTB pada tahun 2018 sebanyak 741 sarana. Sedangkan jumlah dan jenis sarana distribusi/pelayanan menurut Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB sejumlah 4.998 sarana



Gambar 1.4. Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Provinsi NTB

BBPOM di Mataram dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi NTB memanfaatkan sarana transportasi darat, laut dan udara. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja Pulau Lombok menggunakan transportasi darat 1 jam sampai dengan 5 jam. Sedangkan perjalanan ke wilayah kerja Pulau Sumbawa menggunakan transportasi darat dan laut mencapai 6 jam – 12 jam atau menggunakan transportasi udara.

Kondisi geografis Provinsi NTB berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan, dimana untuk Pulau Lombok diperlukan waktu 2 – 3 hari dan untuk Pulau Sumbawa diperlukan waktu 3 - 5 hari.



Gambar 1.5. Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian di Provinsi NTB

BAB 2.

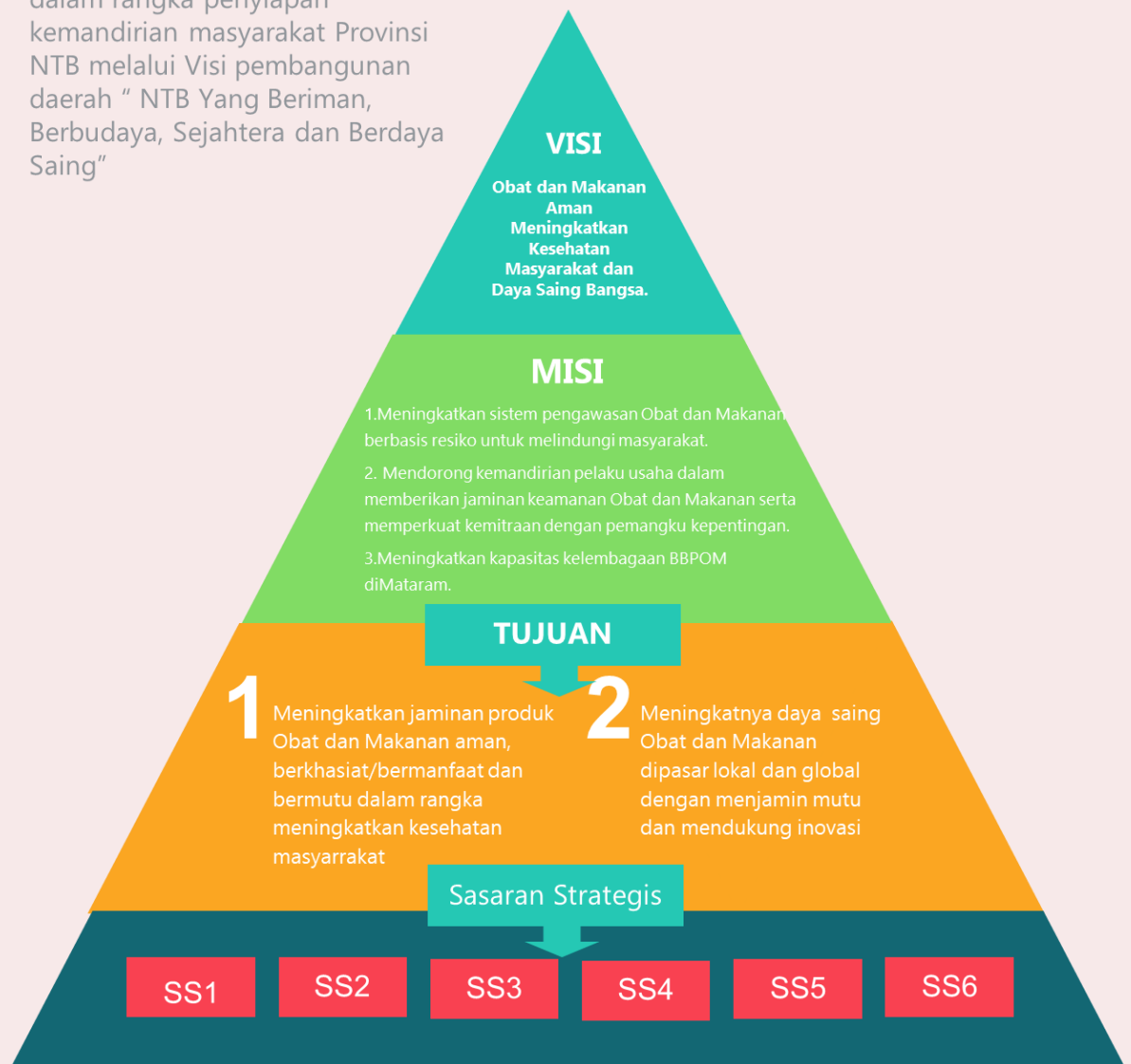
PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis 2015 - 2019

PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Badan POM periode 2015-2019 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 yang berada pada tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Provinsi NTB melalui Visi pembangunan daerah " NTB Yang Beriman, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya Saing"



Sasaran Strategis

“Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB, sesuai review renstra telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja”

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi NTB.

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Mataram tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Mataram merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- a. **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Balai Besar POM di Mataram melakukan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka penerbitan surat rekomendasi sebagai kelengkapan untuk memperoleh nomor izin edar produk Obat dan Makanan.
- b. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
- c. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Sampling produk dilaksanakan melalui gabungan antara metode *purposive target* dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random, kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

d. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif maupun pidana. Pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan sehingga diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 1, maka ditetapkan 6 (enam) indikator beserta target (tabel 2.1).

Tabel 2.1. Indikator dan Target Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Target
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	70.00
2	Persentase obat yang memenuhi syarat	97.50
3	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00
4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;	92.00
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	92.00
6	Persentase makanan yang memenuhi syarat.	92.00

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan SisPOM terdiri dari tiga pilar pengawasan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator untuk menghasilkan produk yang aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha harus dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan produk Obat dan

Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan, antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 71 ayat 1. Dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Mataram bertugas mengawal penerapan kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat strategis. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Dengan demikian masyarakat akan mampu membentengi diri sendiri, keluarga dan masyarakat di sekitarnya dari produk yang tidak memenuhi syarat.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Mataram melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis 2 mempunyai 2 indikator kinerja, namun pada tahun 2018 keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 ini hanya diukur dengan 1 indikator dan target seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Indikator dan Target Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Target
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram.	60.00
2	Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	-



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Sesuai SisPOM dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Mataram secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan 1 (satu) indikator dan target seperti pada tabel tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator dan Target Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Target
1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	60.00

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Mataram mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Mataram, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Disatu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM akan meningkat efektivitasnya melalui strategi dan langkah yang tepat antara

lain dengan peningkatan koordinasi lintas sektor baik dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum maupun lintas sektor lainnya. Balai Besar POM telah melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 4, maka ditetapkan 5 (lima) indikator beserta target (tabel 2.4).

Tabel 2.4. Indikator dan Target Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Target
1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.00
2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	45.00
3	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	45.00
4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.00
5	Rasio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di di wilayah Kerja BBPOM di Mataram	40.00

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia sangat rentan terhadap peredaran produk ilegal. Berdasarkan data kasus peredaran obat ilegal tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa peredaran produk ilegal telah merata di seluruh Provinsi NTB dengan jumlah total 63 kasus.

Untuk itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum secara progresif apabila terjadi pelanggaran terkait Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan bukti pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Proses penegakan hukum akan berjalan efektif apabila kerjasama dengan lintas sektor berjalan dengan baik.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 5, maka ditetapkan 1 (satu) indikator beserta target (tabel 2.5).

Tabel 2.5. Indikator dan Target Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Target
1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	60.00

Sasaran Strategis 6
Terwujudnya RB BBPOM di Mataram sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2015-2019, Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk mendukung peningkatan hasil penilaian eksternal Badan POM meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. BBPOM di Mataram dalam upaya perkuatan kapasitas kelembagaan telah secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu yang terstandar dan tersertifikasi dari pihak eksternal seperti ISO 17025, ISO 9001 dan OHSAS 18001. Selain perbaikan tata manajemen, BBPOM di Mataram juga melakukan pengawasan melekat kepada pegawai melalui penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah seperti yang diamanatkan Inpres Nomor 14 Tahun 2014, sehingga kegiatan yang akan dilakukan disusun untuk mencapai sasaran strategis dan visi.

Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai Besar POM di Mataram agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 diukur dengan 1 (satu) indikator (tabel 2.6).

Tabel 2.6. Indikator dan Target Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Target
1	Nilai AKIP BBPOM di Mataram	78.00

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2018 telah disusun dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPOM di Mataram Nomor HK.06.02.108.12.17.2244A tanggal 1 Desember 2017 (Lampiran 2). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 telah mengacu kepada Dokumen Renstra BBPOM di Mataram 2015 – 2019, yang memuat sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai di tahun 2018, dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2018.

Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BBPOM di Mataram tahun 2018. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 SOTK Lama dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja tanggal 5 Januari 2018 dan Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 SOTK Baru dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja tanggal 5 Oktober 2018.

Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 memuat penugasan pencapaian target kinerja pada tahun berjalan dari Kepala Badan POM RI kepada Kepala BBPOM di Mataram. Untuk melengkapi evaluasi dan monitoring Perjanjian kinerja pada tahun berjalan, maka dokumen perjanjian kinerja juga dilengkapi dengan rencana aksi per triwulan. Sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 rincian Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Indikator dan Target Sasaran Strategis BBPOM di Mataram 2018 OTK Lama

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 OTK Lama

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	97.50
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84.00
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.00
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	92.00
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.00
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	84.00
		2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	11
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	73.00
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2100
		2. Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	900
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	45.00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	1. Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	7.50
		2. Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi OT, Kos, SK, dan Makanan	17.50
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara dibidang obat dan makanan	9

Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	1000
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	40
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Mataram			
1	Pengadaan Prasarana yang Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Indikator dan Target Sasaran Strategis BBPOM di Mataram 2018 OTK Baru

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja BBPOM di Mataram Tahun 2018 OTK Baru

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	70.00
		2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.50
		3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	84.00
		4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.00
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.00
		6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.00

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60.00
		2. Indeks kesadaran masyarakat (Awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	-
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60.00
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.00
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	45.00
		3. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	45.00
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.00
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	40.00
5	Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Balai Besar POM di Mataram	60
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	78.00

Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

Untuk indikator negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya bukan dalam % dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{capaian} = ((2 \times \text{target}) - \text{realiasi}) / \text{target} \times 100\%$$

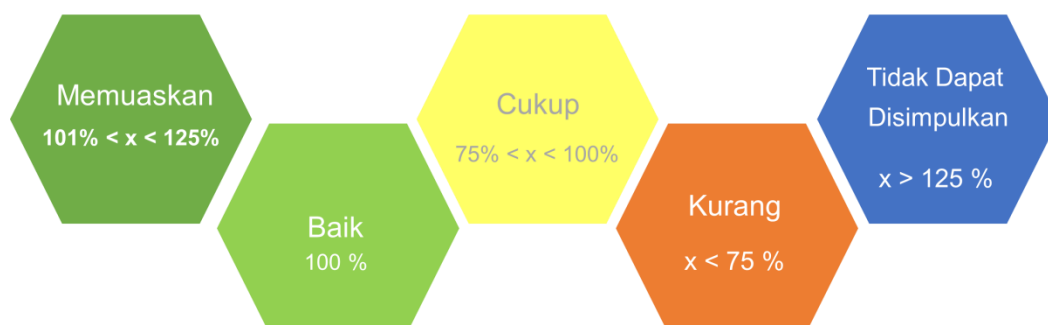
Pengukuran indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \text{realiasi} / \text{target} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{capaian} = ((100 \% - \text{realiasi}) / ((100 \% - \text{target})) \times 100\%$$

Untuk mengukur penilaian capaian sasaran strategis maupun indikator sasaran strategis digunakan skala penilaian seperti ditunjukkan pada bagan berikut :



Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat"

$$NPS 1 = \frac{1NPI1 + 2,5NPI2 + 1,5NPI3 + 2,5NPI4 + 1,5NPI5 + 1NPI6}{10}$$

Sasaran Strategis 2 "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram"

$$NPS 2 = NPI1$$

Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram"

$$NPS 3 = NPI1$$

Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat"

$$NPS 4 = \frac{1NPI1 + 1NPI2 + 1NPI3 + 1NPI4 + 1NPI5}{10}$$

Sasaran Strategis 5 "Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram"

$$NPS 5 = NPI1$$

Sasaran Strategis 6 "Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019"

$$NPS 6 = NPI1$$

BAB 3.

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian kinerja sesuai dengan SOTK baru diukur dengan membandingkan realisasi 15 (lima belas) indikator pada 6 (enam) sasaran strategis dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2018. Secara ringkas capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Mataram tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	98.16	Cukup
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	82.88	Cukup
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	104.42	Memuaskan
4.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat	115.13	Memuaskan
5.	Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	100.00	Baik
6.	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97.13	Cukup

Pada tahun 2018 BBPOM di Mataram telah melakukan pengukuran kinerja sasaran strategis dengan hasil sebagai berikut:

1. Dua sasaran strategis dengan nilai capaian sasaran diatas 100% dengan kriteria **Memuaskan**, yaitu:
 - a. Sasaran strategis 3; Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Mataram (104,42%),
 - b. Sasaran strategis 4; Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat (115,13%).
2. Satu sasaran strategis dengan nilai capaian sasaran 100% dengan kriteria **Baik**, yaitu sasaran strategis 5; Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram dengan capaian 100%.
3. Tiga sasaran strategis dengan nilai capaian sasaran dibawah 100% dengan kriteria **Cukup**, yaitu:
 - a. Sasaran strategis 1; Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai capaian sasaran 98,16%.
 - b. Sasaran strategis 2; Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram dengan nilai capaian sasaran 82,88%.
 - c. Sasaran strategis 6; terwujudnya RB BBPOM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 dengan nilai capaian sasaran 97,13%.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 karena adanya perbedaan sasaran maupun indikator dimana tahun 2018 terdapat 6 sasaran strategis sedangkan tahun 2017 dengan 3 sasaran strategis yang berbeda. Sasaran strategis dan capaiannya pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	109,02%	Memuaskan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	101,04%	Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	91,03%	Cukup

Hasil pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Mataram tahun 2018 jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Balai Besar POM lainnya dalam *cluster* yang sama yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura dapat dilihat pada table 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

No.	Sasaran Strategis	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	98.16	106,83	107,10	101,83
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	82.88	124,92	98,33	98,45
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	104.42	111,1	92,42	65,55
4	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	117.58	132,51	81,83	94,83
5	Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	100.00	134,62	104,17	111,12
6	Terwujudnya RB BBPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97.13	93,76	95,92	91,47

Untuk capaian Sasaran Strategis 1, BBPOM di Mataram mencapai kriteria cukup sedangkan ketiga BBPOM lainnya mencapai nilai diatas 100% dengan kriteria memuaskan. Pada Sasaran Strategis 2, hanya BBPOM di Manado yang mencapai nilai diatas 100%. Untuk itu BBPOM di Mataram harus bekerja lebih keras lagi serta melakukan inisiatif perbaikan kinerja untuk mendongkrak capaian indikator SS1 dan SS2 sehingga dapat memenuhi target di tahun yang akan datang.

Sasaran Strategis 3 dan Sasaran Strategis 4, hanya BBPOM di Mataram dan BBPOM di Manado yang mencapai nilai diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan dan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat meningkat. Pada Sasaran

Strategis 5, keempat BBPOM telah mencapai target, yakni ketiga BBPOM lainnya sama-sama mencapai nilai diatas 100% sedangkan BBPOM di Mataram 100 % sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing BBPOM telah efektif dalam penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.

Pada Sasaran Strategis 6 keempat BBPOM pencapaiannya di bawah 100%, namun BBPOM di Mataram pencapaiannya paling tinggi dibanding ketiga BBPOM lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di BBPOM di Mataram telah berjalan dengan cukup baik dibanding ketiga BBPOM lainnya, namun BBPOM di Mataram harus terus bekerja keras dan melakukan inisiatif perbaikan kinerja agar capaian indikator SS6 dapat memenuhi target di tahun yang akan datang.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas dan fungsi utama Badan POM, dan khususnya BBPOM di Mataram untuk *catchment area* NTB.

Sasaran Strategis pertama ini mempunyai enam indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis pertama ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 1 BBPOM di Mataram Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	70.0	61.10	87.29	Cukup
	Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.5	95.57	98.02	Cukup
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	84.0	78,54	93.50	Cukup
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.0	99,34	107,97	Memuaskan
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.0	90.67	98.55	Memuaskan
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92.0	83.92	91.22	Cukup
NPS				98.16	Cukup

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) pada Sasaran Strategis 1 sebesar 98,16% dengan kriteria **cukup**. Nilai capaian ini merupakan kontribusi dari 6 indikator kinerja dengan nilai pencapaian indikator (NPI) terendah pada indikator 1 "Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" dengan NPI 87,29% dan tertinggi pada indikator ke 4 "Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat" dengan NPI 107,97%.

Kontribusi terbesar dari kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat” antara lain tingginya temuan TMK penandaan/label pada produk obat tradisional sebesar 16% dari total 452 sampel obat tradisional. Untuk itu BBPOM di Mataram akan mendorong kepada Kedeputusan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk memberikan sanksi yang tegas kepada produsen obat tradisional, terkait produk yang TMK penandaan/label. Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS1 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada indikator Kinerja SS1.

No	Indikator Kinerja	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	87,29	110,00	86,00	93,57
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	98,02	104,40	105,41	105,13
3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	93,50	109,99	116,51	107,38
4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	107,97	105,26	108,28	103,01
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	98,55	105,26	121,95	100,70
6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	91,22	106,05	104,46	100,02

Pada tahun 2018, capaian BBPOM di Mataram pada SS1 dicapai dengan 1 indikator yang mempunyai capaian dengan kriteria **Memuaskan** yaitu Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan 5 indikator lainnya dengan kriteria cukup.

Perbandingan capaian indikator BBPOM di Mataram pada SS1 dengan BBPOM lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2018 Nilai Capaian BBPOM di Mataram (87,29%) dengan kriteria cukup. Nilai Capaian tersebut lebih besar dari capaian BBPOM di Palangkaraya (86,00%), lebih kecil bila dibandingkan dengan BBPOM di Manado (110,00%) dan BBPOM di Jayapura (93,57%).
2. Indikator Presentase Obat yang memenuhi syarat. Pada tahun 2018 Nilai Capaian BBPOM di Mataram (92,02%), dengan kriteria cukup. Nilai capaian tersebut lebih kecil dibandingkan dengan BBPOM di Manado (104,40%), BBPOM di Palangkaraya (105,41%) dan BBPOM di Jayapura (105,13%).
3. Indikator Presentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat. Pada tahun 2018 Nilai Capaian BBPOM di Mataram (93,50%) dengan kriteria cukup. Nilai Capaian tersebut lebih kecil dari

BBPOM di Manado (109,99%), BBPOM di Palangkaraya (116,51%) dan BBPOM di Jayapura (107,38%).

4. Indikator Presentase Kosmetik yang memenuhi syarat. Pada tahun 2018 Nilai Capaian BBPOM di Mataram (107,97%) dengan kriteria memuaskan. Nilai Capaian lebih tinggi dari capaian BBPOM di Manado (105,26%), BBPOM di Jayapura (103,01%), namun lebih kecil dari BBPOM di Palangkaraya (108,28%).
5. Indikator presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat. Pada tahun 2018 Nilai Capaian BBPOM di Mataram (98,55%) dengan kriteria cukup. Nilai capaian tersebut lebih rendah dari capaian BBPOM di Manado (105,26%), BBPOM di Palangkaraya (121,95%), dan BBPOM di Jayapura (100,70%).
6. Indikator Presentase Makanan yang memenuhi syarat. Pada tahun 2018 Nilai Capaian BBPOM di Mataram (91,22%) dengan kriteria cukup. Nilai capaian tersebut lebih kecil dibandingkan capaian BBPOM di Manado (106,05%), BBPOM di Palangkaraya (104,46%), dan BBPOM di Jayapura (100,02%).

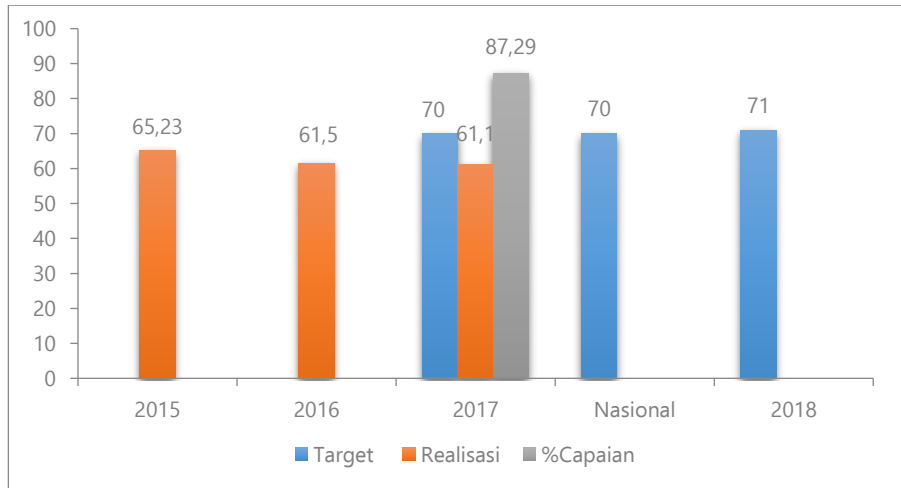
Analisis capaian dari masing – masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal hierarchy process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 sehingga nilai capaian merupakan nilai capaian IPOM pada tahun 2017. Capaian indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2017 adalah sebesar 87,29 % dari target 70,0 dengan kriteria cukup.



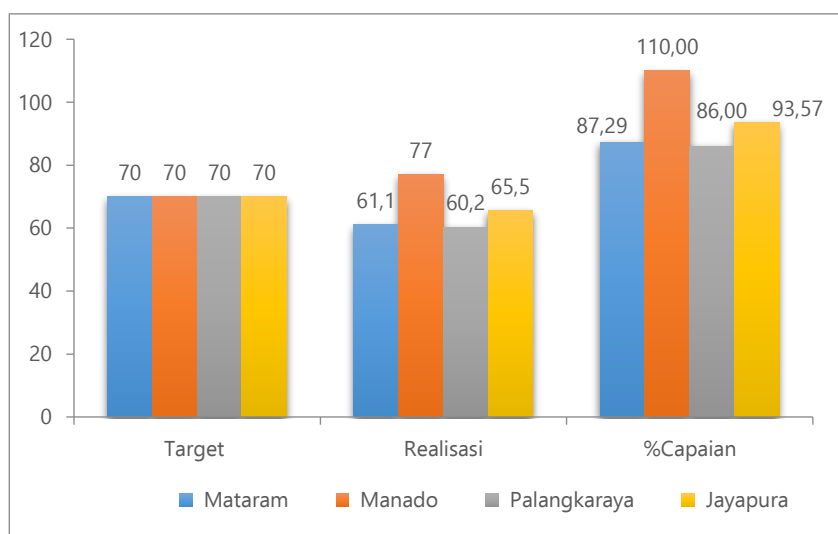
Realisasi indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram tahun 2017 sebesar 61,1 dari target 70,0 dengan nilai pencapaian indikator (NPI) sebesar 87,29 dengan kriteria cukup.



Gambar 3.1 Profil Target, Realisasi dan Capaian Indikator IPOM Tahun 2015-2018

Realisasi IPOM tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan IPOM tahun 2016 (61,5) dan tahun 2015 (65,23).

Bila dibandingkan dengan target nasional (70,0), indikator tersebut baru tercapai sebesar 87,29%. Demikian halnya jika dibandingkan dengan target tahun 2019 (71,0) maka baru tercapai sebesar 86,06%. Hal ini disebabkan karena indeks ini merupakan indikator baru, sehingga strategi yang disiapkan untuk pencapaiannya belum optimal.



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Indikator IPOM BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Nilai indikator indeks POM pada tahun 2018 BBPOM di Mataram (87,29%) lebih besar jika dibandingkan dengan BBPOM di Palangkaraya (86,00%). Sedangkan jika dibandingkan dengan BBPOM di Manado (110,00%) dan BBPOM di Jayapura (93,57%), nilai BBPOM di Mataram lebih kecil. Untuk meningkatkan indeks POM upaya yang dapat dilakukan adalah Bimtek kepada pelaku usaha, peningkatan pengawasan yang berbasis kemitraan dengan lintas sector terkait agar pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan jumlah produk dan sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

b. Presentase Obat yang memenuhi Syarat

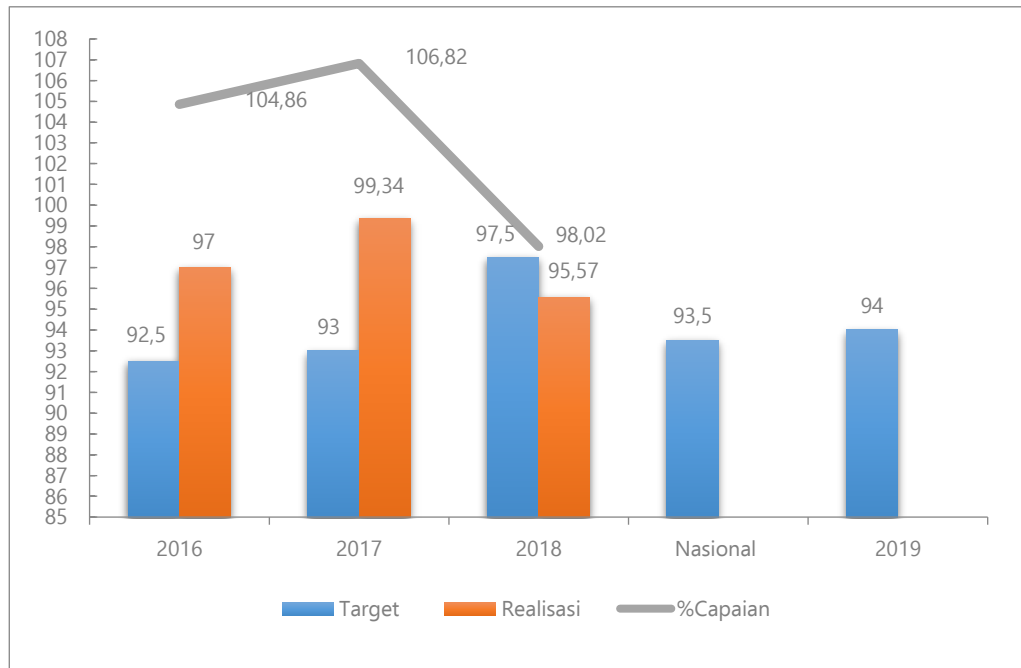
Pada tahun 2018 telah dilakukan sampling dan pengujian terhadap 609 sampel obat dan napza. Dari pengujian sampel, dihasilkan 3 sampel tidak memenuhi syarat kimia antara lain 2 sampel TMS disolusi dan 1 sampel rokok, kadar nikotinnya tidak sesuai label. Dari pengawasan label/penandaan obat terhadap seluruh sampel (609) ditemukan 24 sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sehingga total obat yang tidak memenuhi syarat sebanyak 27 sampel. Profil hasil pengujian obat seperti terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Profil Hasil Pengujian Obat Tahun 2016-2018

Hasil Uji	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Memenuhi Syarat	582	97.00	598	99,31	582	95,57
TIE/Rusak/Kadaluarsa	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label	0	0.00	1	0.17	24	3.94
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mutu :	18	3.00	3	0.50	3	0.49
TMS Kadar	6	1.00	0		0	
TMS Disolusi	5	0.83	0		2	0.33
TMS Kadar nikotin (rokok)	0	0.00	0		1	0.16
TMS Kadar, Disolusi dan Keseragaman Kandungan	0	0	1	0.17		
TMS pH	4	0.67	0		0	
TMS DNA Babi	3	0.50	2	0.33	0	
Total Sampel	600	100.00	602	100.00	609	100.00

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di tahun 2018 adalah 95,57% dari target 97,5% atau tercapai sebesar 98,02% dengan kriteria cukup. Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:





Gambar 3.3 Profil Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang MS tahun 2016-2019

Realisasi obat yang memenuhi syarat (MS) tahun 2018 (95.57%) bila dibandingkan dengan tahun 2017 (99.34%) dan tahun 2016 (97.00%) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena definisi obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahun 2018 mengalami perubahan. Bila digunakan definisi operasional yang sebelumnya, realisasi tahun 2018 menjadi sebesar 99,51%, lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2017 dan 2016, disebabkan karena hasil pengawasan penandaan/label yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 24 sampel (3,94%), mempunyai kontribusi yang besar terhadap hasil TMS pada tahun 2018.

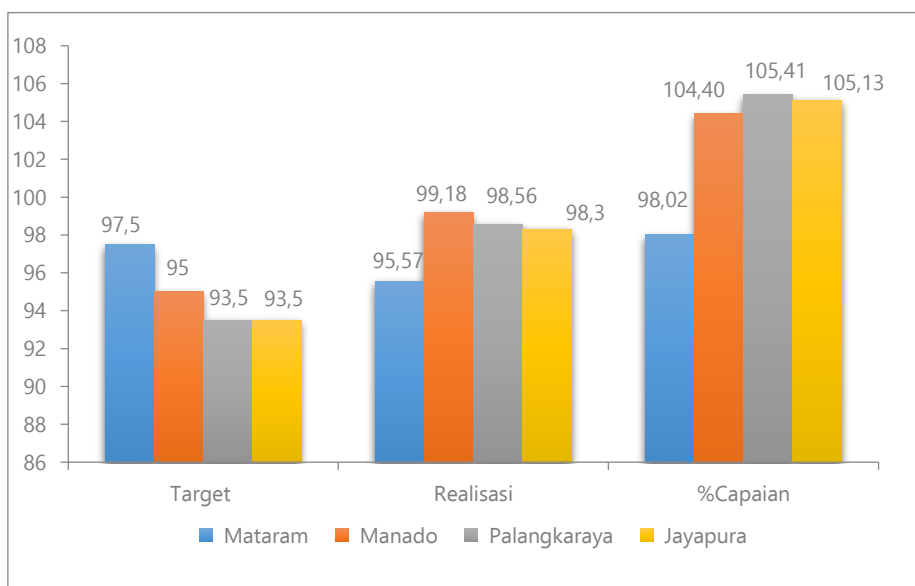
Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 93,5% maka realisasi yang dicapai oleh BBPOM di Mataram telah melampaui target nasional dengan capaian 102,21%. Demikian halnya jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 94,0%, menunjukkan bahwa target tahun 2019 sudah tercapai bahkan terlampaui dengan capaian sebesar 101,67%.

Persentase capaian yang melampaui target tahun 2019 dapat saja terjadi karena penetapan target yang terlalu rendah serta prediksi yang kurang tepat terhadap kemampuan dan potensi maksimal yang dapat dilakukan dalam mencapai target, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan penetapan target terhadap persentase obat yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan trend data yang ada.

Meskipun di NTB tidak terdapat industri farmasi, salah satu faktor yang memberi kontribusi positif terhadap capaian ini adalah adanya komitmen industri farmasi dalam menerapkan GMP/CPOB terkini dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat. Dikutip dari data Badan POM RI tahun 2016, dari 207 industri farmasi yang ada di Indonesia, 192 (92,75%) diantaranya sudah memiliki sertifikat CPOB terkini, yang terus dimonitor penerapannya oleh Badan POM RI.

Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator ini, Balai Besar POM di Mataram melakukan upaya/kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan penerapan CDOB pada rantai distribusi obat untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat agar tetap terjaga di tangan konsumen dan mencegah diversi penyaluran obat dengan menjaga agar pengadaan obat hanya dari distributor resmi untuk menghindari obat ilegal/palsu ke PBF. Selain itu, penyimpanan obat dapat dikendalikan sehingga stabilitas obat terjaga, dan tidak terjadi penyaluran obat ke jalur ilegal yang memicu penyalahgunaan obat, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang Cara Distribusi Obat yang Baik. Meningkatkan pelaksanaan monitoring *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- b. Melakukan pengawasan yang disertai dengan **low enforcement**, dengan melakukan penindakan secara **Pro Justitia** terhadap penyalahgunaan obat. Dari 10 perkara yang ditindaklanjuti secara *pro justitia*, 5 perkara diantaranya merupakan pelanggaran obat tanpa ijin edar, dan 3 perkara diantaranya sudah selesai sampai tahap II.
- c. Pelaksanaan sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2018.



Gambar 3.4 Perbandingan capaian indikator Persentase Obat yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Dari grafik gambar 3.4 menunjukkan bahwa capaian BBPOM di Manado (104,40%), BBPOM di Palangkaraya (105,41%) dan BBPOM di Jayapura (105,13%) telah melampaui target (>100,0%) dengan kriteria memuaskan, sedangkan BBPOM di Mataram sebesar (98,02%) capaiannya kurang dari 100,0% dengan kriteria cukup. Capaian BBPOM di Mataram yang lebih rendah dibanding ketiga BBPOM lainnya, selain disebabkan karena realisasi yang relatif rendah juga disebabkan karena target yang lebih tinggi dibanding target ketiga BBPOM lainnya. Oleh karena itu BBPOM di Mataram perlu meningkatkan kinerja agar capaian persentase obat yang memenuhi syarat yang relatif rendah di tahun ini, dapat dicapai lebih baik lagi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mendorong kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif agar melakukan penindakan yang lebih tegas kepada produsen obat yang produknya tidak memenuhi ketentuan (TMK) label/penandaan, sehingga diharapkan produk obat yang beredar tidak ada lagi yang label/penandaannya tidak memenuhi ketentuan.

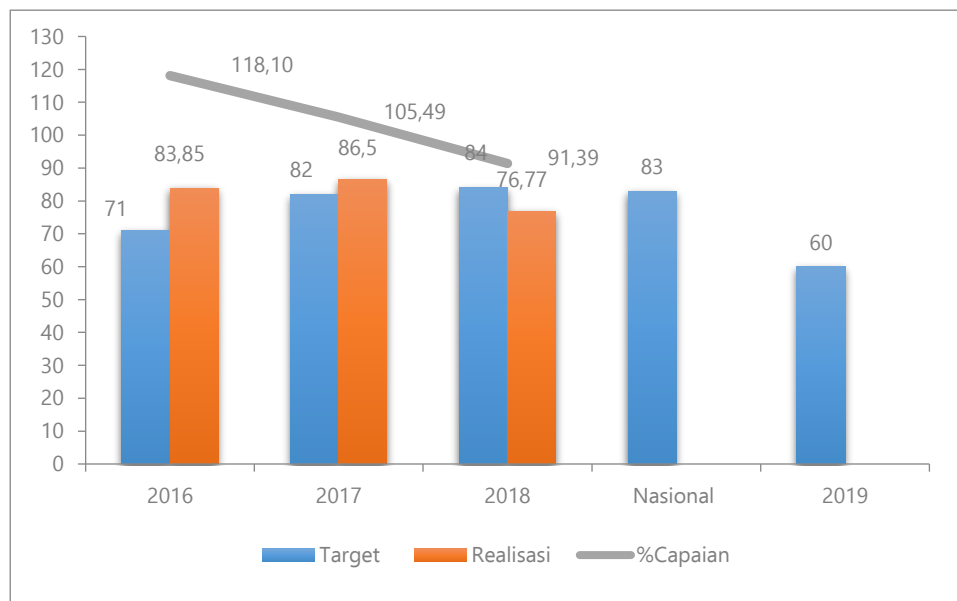
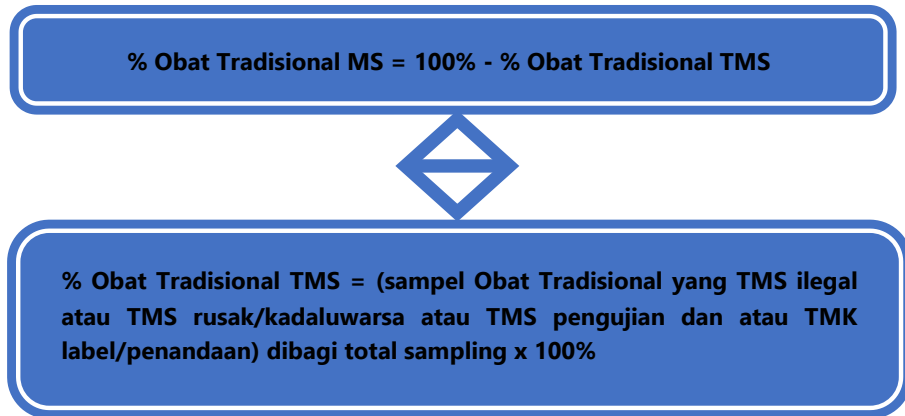
c. Presentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 jumlah sampel obat tradisional (OT) yang disampling dan diuji sesuai standar sebanyak 452 sampel, dengan hasil 34 sampel (7,52%) TMS pengujian. Dari pengawasan penandaan/label terhadap keseluruhan sampel (452) ditemukan 63 sampel (13,94%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari obat tradisional TMS uji, 2 (dua) sampel diantaranya mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berupa Sildenafil dan Metformin. Seluruh sampel positif mengandung BKO tersebut merupakan produk dari produsen luar provinsi NTB. Profil hasil pengujian obat tradisional seperti terlihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional Tahun 2016-2018

Hasil Uji	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Memenuhi Syarat	379	83.85	391	86.50	355	78.54
TIE/Rusak/Kadaluarsa	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label	0	0.00	0	0.00	63	13.94
Tidak memenuhi syarat (TMS) BKO	4	0.88	5	1.11	2	0.44
Tidak memenuhi syarat (TMS) Mutu	69	15.27	55	12.17	20	4.42
Uji Fisika-Kimia	28	6.19	0	0	0	0
Uji Mikrobiologi	41	9.07	55	12.17	12	2.65
Tidak memenuhi syarat (TMS) Label	0	0.00	1	0.22	0	0.00
Total Sampel	452	100.00	452	100.00	452	100.00

Realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di tahun 2018 adalah 78,54% dari target 84,0% atau tercapai sebesar 93,50% dengan kriteria cukup. Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:



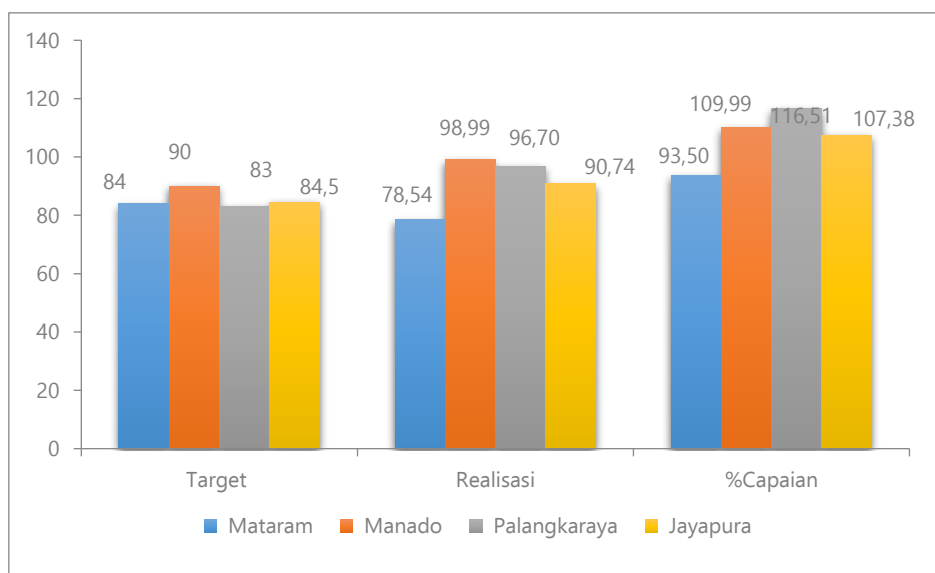
Gambar 3.5 Profil Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Presentase Obat Tradisional MS tahun 2016-2019

Realisasi obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 (78.54%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 (86.50%) dan tahun 2016 (83.85%) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena definisi obat tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat pada tahun 2018 mengalami perubahan. Bila digunakan definisi operasional yang sebelumnya, realisasi tahun 2018 menjadi 92,48%, lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2017 dan 2016. Hal ini disebabkan karena hasil TMS pada tahun 2018 banyak disumbang dari pengawasan penandaan/label yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 63 sampel (13,94%).

Bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2018 (83,0%) maka target tersebut baru tercapai sebesar 94,63%. Namun apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (60%) maka target tersebut telah terlampaui sebesar 130,90% di tahun 2018. Mengingat capaian tersebut yang sudah sangat tinggi, diusulkan agar target indikator di tahun 2019 agar ditinjau kembali.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Pengawasan terhadap sarana obat tradisional baik produksi maupun distribusi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.
- Pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha. Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) baik Pelaku Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) maupun Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) yang berkesinambungan sehingga mendorong kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku, serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap.
- Melakukan pengawasan yang disertai dengan *low inforcement*, dengan melakukan penindakan secara Pro Justitia terhadap peredaran obat tradisional tanpa ijin edar (TIE). Dari 10 perkara yang ditindaklanjuti secara pro justitia, 3 perkara diantaranya merupakan pelanggaran obat tradisional tanpa ijin edar, dan 2 perkara diantaranya sudah selesai sampai tahap II.
- Sampling dan pengujian yang berpedoman pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2018



Gambar 3.6 Perbandingan capaian indikator Persentase Obat Tradisional yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Dari grafik 3.6 menunjukkan bahwa capaian BBPOM di Manado (109,99%), BBPOM di Palangkaraya (116,51%) dan BBPOM di Jayapura (107,38%) telah melampaui target (>100,0%) dengan kriteria memuaskan, sedangkan BBPOM di Mataram sebesar (93,50%) capaiannya kurang dari 100,0% dengan kriteria cukup. Oleh karena itu BBPOM di Mataram perlu meningkatkan kinerja agar capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat yang relatif rendah di tahun ini, dapat dicapai lebih baik lagi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mendorong ke deputian Bidang Pengawasan Obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik agar memberikan sanksi yang tegas kepada produsen obat tradisional yang produknya tidak memenuhi ketentuan (TMK) label/penandaan, sehingga diharapkan produk obat tradisional yang beredar tidak ada lagi yang label/penandaannya tidak memenuhi ketentuan.

d. Presentase Kosmetik yang memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 pencapaian kinerja untuk indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat di tahun 2018 mendapat nilai dengan kriteria Memuaskan, karena dari target sebesar 92,0%, dapat direalisasikan sebesar 99,34%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 107,97%. Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:

$$\% \text{ Kosmetik MS} = \frac{\text{Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan}}{\text{Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \times 100\%$$

Upaya pencapaian indikator kinerja yang memuaskan ini antara lain:

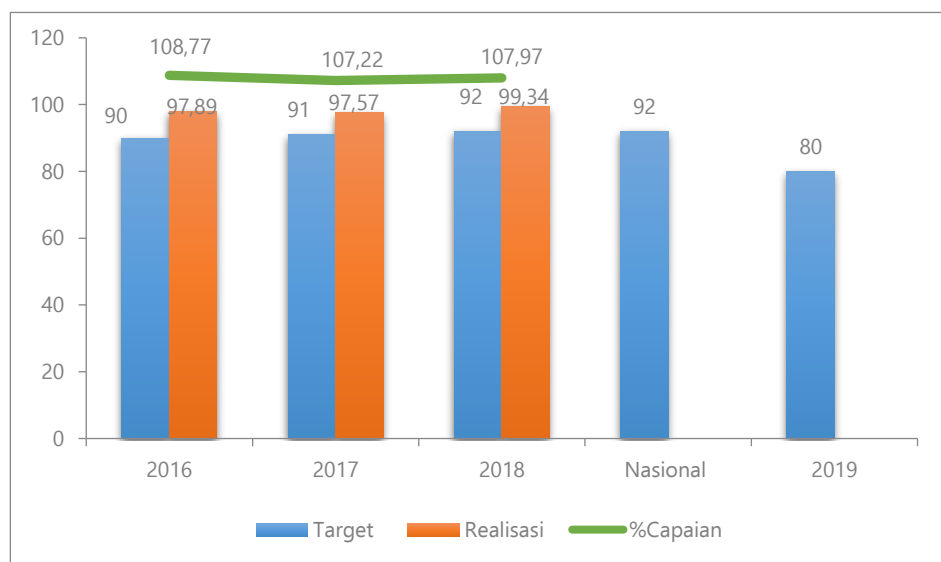
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/sarana distribusi terhadap mutu dan keamanan kosmetik mengingat masih ditemukannya kosmetik tanpa ijin edar (TIE) dan kosmetik mengandung bahan berbahaya.
- Penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan khususnya terhadap sarana distribusi yang memiliki track record temuan produk kosmetik tanpa ijin edar (TIE)
- Melakukan Edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), agar pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar semakin meningkat sehingga lebih selektif dalam memilih kosmetik yang aman.

Pada tahun 2018 jumlah sampel kosmetik yang disampling sejumlah 903 sampel. Sampel yang diuji dengan parameter kritis (sesuai standar) sebanyak 899 sampel, sedangkan 4 sampel lainnya hanya dilakukan penilaian penandaan/label dan tidak dikirim ke laboratorium karena tidak mempunyai ijin edar (TIE). Dari 899 sampel yang diuji diperoleh hasil 897 sampel (99,34%) memenuhi syarat (MS) dan 6 sampel (0,66%) tidak memenuhi

syarat (TMS). Dari jumlah kosmetik TMS, 1 (satu) sampel mengandung bahan pewarna dilarang Merah K3, 2 (dua) sampel kadar zat aktif/pelarut melebihi batas masing-masing triklosan dan metanol serta 3 (tiga) sampel TMS uji mikrobiologi. Profil hasil pengujian kosmetik seperti terlihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Profil Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2016-2018

Hasil Uji	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Memenuhi Syarat (MS)	881	97.89	882	97.57	897	99.34
Tidak memenuhi syarat Bahan Berbahaya (TMS BB)	11	1.22	10	1.11	1	0.11
Tidak memenuhi syarat (TMS) Mutu	8	0.89	12	1.33	5	0.55
Uji Kimia	3	0.33	10	1.11	2	0.22
Uji Mikrobiologi	5	0.56	2	0.22	3	0.33
Total Sampel	900	100	904	100	903	100

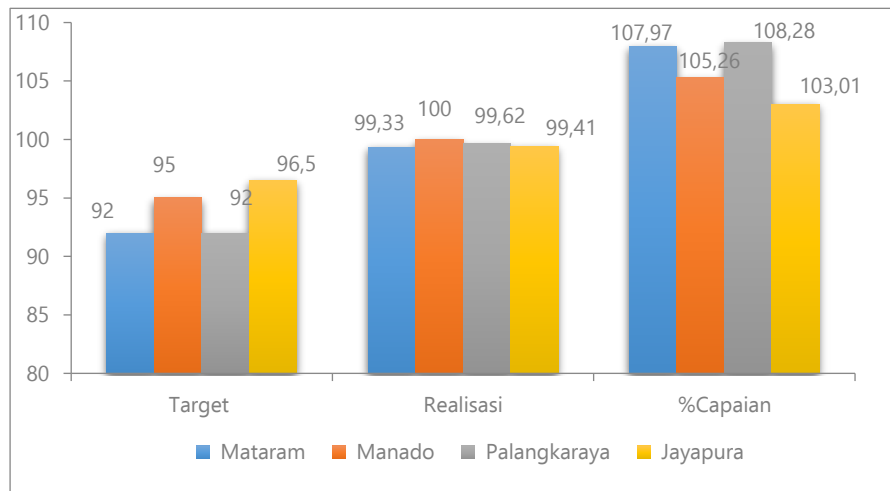


Gambar 3.7 Profil Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Presentase Kosmetik MS Tahun 2016-2019

Capaian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 (107.98%) meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (107.22%) dan sedikit penurunan dari tahun 2016 (108.77%), namun realisasi kosmetik yang memenuhi syarat menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2016-2018 dimana realisasi tahun 2018 sebesar 97.89%, tahun 2017 sebesar 97.57% dan tahun 2016 sebesar 83.85%. Capaian ini juga telah melampaui target nasional (92,0%) sebesar 107,98%.

Target tahun 2019 sesuai rewiu renstra 2015-2019 diturunkan menjadi 80%. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan definisi operasional pada indikator ini, dimana hasil kosmetik tidak memenuhi syarat pada tahun 2018 hanya dari hasil pengujian, sedangkan tahun 2019 data kosmetik TMS selain dari hasil pengujian juga dari hasil pengawasan

label/penandaan. Sehingga jika menggunakan realisasi tahun 2018 untuk menghitung capaian tahun 2019, maka hasilnya tidak akan akurat. Perbandingan capaian indikator Persentase Kosmetik yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya dapat dilihat pada gambar 3.8.



Gambar 3.8. Perbandingan capaian indikator Persentase Kosmetik yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Tahun 2018 capaian BBPOM di Mataram (107,97%), BBPOM di Manado (105,26%), BBPOM di Palangkaraya (108,28%) dan BBPOM di Jayapura (103,01%) mencapai nilai indikator dengan kriteria memuaskan. BBPOM di Mataram tetap dituntut untuk terus melakukan upaya insiatif agar kinerja semakin meningkat, mengingat tantangan pengawasan produk kosmetik semakin berat di era Harmonisasi ASEAN ini. Sehingga masyarakat semakin terlindungi dari kosmetik yang beresiko terhadap kesehatan.

e. Presentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi Syarat

Pada tahun 2018 jumlah sampel suplemen kesehatan (SK) yang disampling sejumlah 150 sampel. Sampel yang diuji dengan parameter kritis (sesuai standar) sebanyak 149 sampel, sedangkan 1 sampel lainnya hanya dilakukan penilaian penandaan/label dan tidak dikirim ke laboratorium karena tidak mempunyai ijin edar (TIE). Dari 149 sampel yang diuji diperoleh hasil 136 sampel (90,67%) memenuhi syarat (MS) dan 8 sampel (5,33%) tidak memenuhi syarat (TMS) kadar zat aktif (vitamin B) kurang dari persyaratan. Dari pengawasan label/penandaan terhadap seluruh sampel (150) ditemukan 5 sampel (3,33%) yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), sehingga total suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 14 sampel (9,33%).

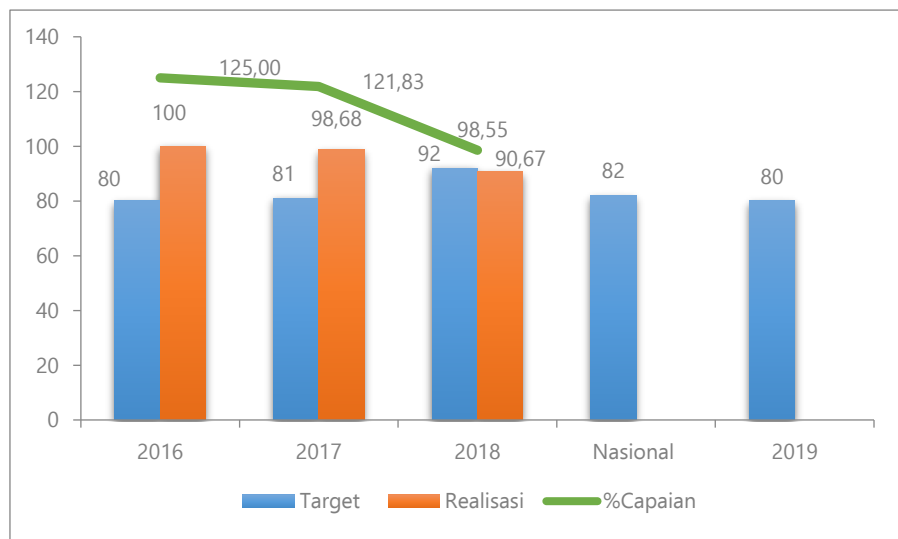
Tabel 3.9 Profil Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Tahun 2016-2018

Hasil Uji	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Memenuhi Syarat	150	100.00	149	98.68	136	90.67
TIE/Rusak/Kadaluarsa	-	-	-	-	1	0.67
Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label	-	-	-	-	5	3.33
Tidak memenuhi syarat (TMS) Mutu	0	0.00	2	1.32	8	5.33
Total Sampel	150	100.00	151	100.00	150	100.00

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 90,67% dari target 92,0%, sehingga pencapaian kinerja sebesar 98,55% dengan kriteria cukup. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan :

$$\% \text{ Suplemen Kesehatan MS} = 100\% - \% \text{ Suplemen Kesehatan TMS}$$

$$\% \text{ Suplemen Kesehatan TMS} = (\text{sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$



Gambar 3.9 Profil Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Presentase Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2016-2019

Realisasi suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 (90.67%) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 (98.68%) dan tahun 2016 (100.00%) mengalami penurunan. Hal ini selain disebabkan karena bertambahnya sampel yang TMS, juga disebabkan karena perubahan (perluasan) definisi suplemen kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat pada tahun 2018, yakni tidak hanya berasal dari TMS hasil uji

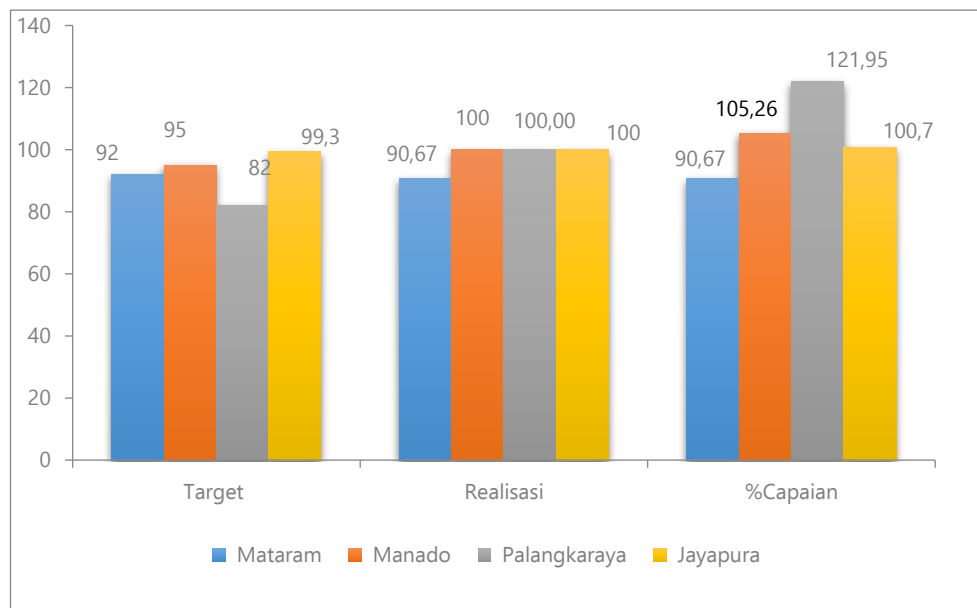
laboratorium tapi juga dari uji penandaan/label, dimana terdapat 6 sampel yang TMK label/penandaan dan 1 sampel TIE.

Realisasi tahun 2018 telah melampaui target nasional (82,0%) dan target tahun 2019 (80%) dengan capaian masing-masing sebesar 110,57% dan 113,34%.

Persentase capaian yang jauh melampaui target tahun 2019 terjadi kemungkinan karena penetapan target yang terlalu rendah serta adanya variabel baru yang dimasukkan dalam definisi operasional produk TMK.

Beberapa kegiatan yang menunjang capaian indikator ini, antara lain:

- a. Pelaksanaan pengawasan suplemen kesehatan telah dilaksanakan secara intensif;
- b. Pelaksanaan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih suplemen kesehatan yang akan digunakan/dikonsumsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan suplemen kesehatan yang diproduksi/diedarkan.



Gambar 3.10. Perbandingan capaian indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

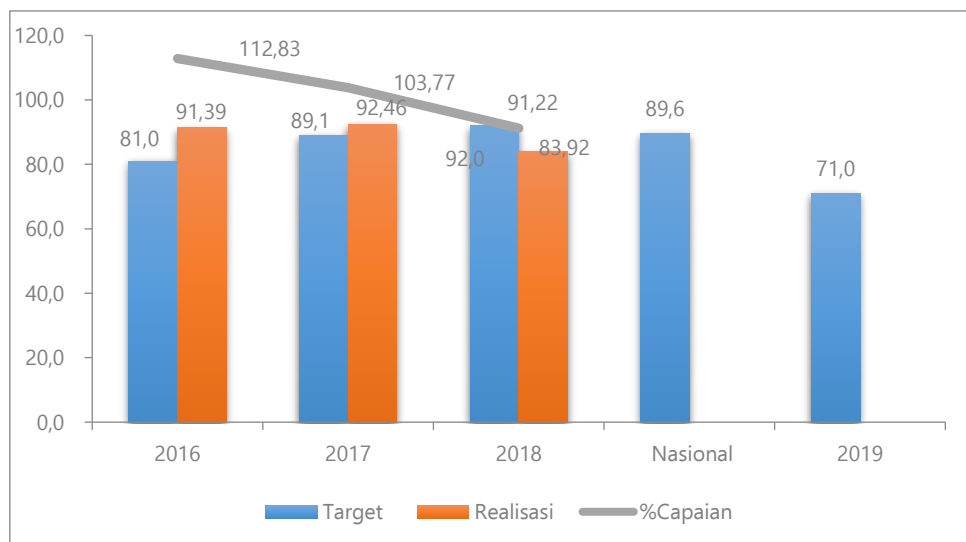
Capaian BBPOM di Manado (105,26%), BBPOM di Palangkaraya (121,95%) dan BBPOM di Jayapura (100,70%) telah melampaui target (>100,0%) dengan kriteria memuaskan, sedangkan BBPOM di Mataram sebesar (90,67%) capaiannya kurang dari 100,0% dengan kriteria cukup. Oleh karena itu BBPOM di Mataram perlu meningkatkan kinerja agar capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat yang relatif rendah dibandingkan BBPOM lainnya di tahun ini dapat dicapai lebih baik lagi.

f. Presentase Makanan yang memenuhi Syarat

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2018 adalah 83,92% dari target 92,0% atau tercapai sebesar 91,22% dengan kriteria cukup. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan}}{\text{Total Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 jumlah makanan yang disampling dan diuji dengan parameter kritis (sesuai standar) sebanyak 902 sampel. Dari pengujian diperoleh hasil 757 makanan (83,92%) memenuhi syarat (MS) dan 145 sampel (16,08%) tidak memenuhi syarat (TMS). Sejumlah 3 (tiga) sampel diantaranya mengandung bahan berbahaya yaitu formalin dalam mi basah. Makanan TMS lainnya yang berkontribusi besar antara lain Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang kadarnya melebihi batas yaitu pemanis buatan (sakarín dan siklamat), pengawet (asam benzoat dan asam sorbat) serta kadar zat fortifikasi dan kadar air yang tidak sesuai persyaratan. Sebagian besar pangan fortifikasi yakni garam beryodium sebanyak 32 sampel (3,55%) tidak memenuhi syarat, dimana kadar iodium dan NaCl kurang dari persyaratan serta kadar airnya melebihi persyaratan.

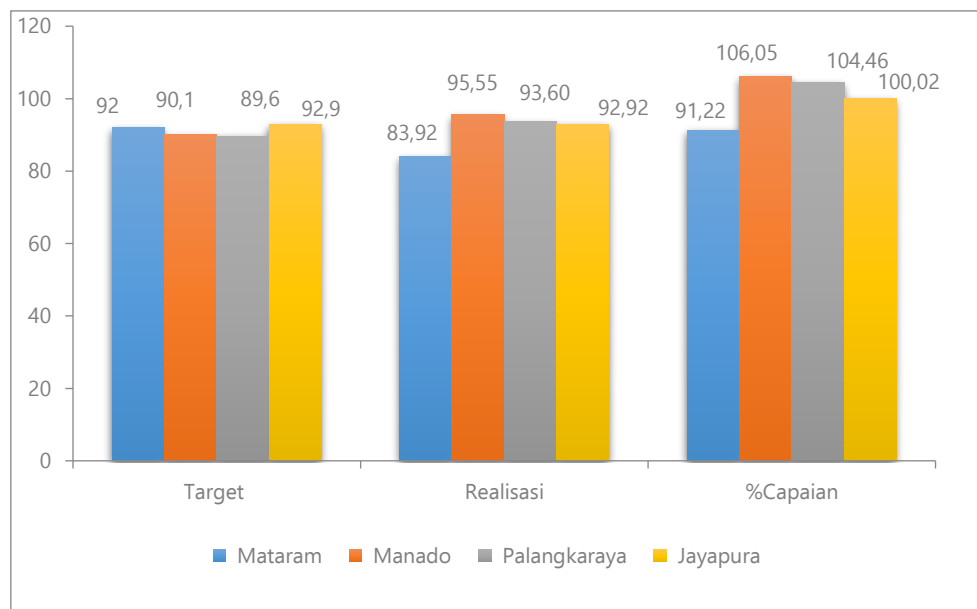


Gambar 3.11 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Presentase Makanan yang MS Tahun 2016-2019

Dari grafik terlihat bahwa realisasi dan capaian makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 (91.22%) jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 (103.77%) dan tahun 2016 (112.83%). Hal ini disebabkan antara lain karena Perhitungan makanan MS ataupun TMS

pada tahun 2018 didasarkan pada hasil uji semua produk, baik produk makanan yang mendapat izin edar (MD/ML) dari Badan POM, sampel yang mendapat izin dari dinas kesehatan (PIRT), dan sampel tidak terdaftar. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya berdasarkan pada penilaian produk makanan yang mendapat izin edar (MD/ML) dari Badan POM. Hal ini berdampak signifikan terhadap perhitungan persentase produk makanan yang memenuhi syarat karena sebagian besar produk yang tidak memenuhi syarat berasal dari produk PIRT (49) dan produk tidak terdaftar seperti garam beryodium dan pangan jananan anak sekolah (PJAS) sebanyak 57 sampel.

Bila dibandingkan dengan target nasional (89,60%), maka target tersebut baru tercapai sebesar 93,66%. Sedangkan target tahun 2019 (71%) telah terlampaui sebesar 128,49% di tahun 2018.



Gambar 3.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Persentase Makanan yang MS BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Capaian BBPOM di Manado (106,05%), BBPOM di Palangkaraya (104,46%) dan BBPOM di Jayapura (100,02%) telah melampaui target (>100,0%) dengan kriteria memuaskan, sedangkan BBPOM di Mataram sebesar (91,22%) capaiannya kurang dari 100,0% dengan kriteria cukup. Oleh karena itu, BBPOM di Mataram perlu meningkatkan kinerja agar capaian persentase makanan yang memenuhi syarat yang relatif rendah di tahun ini dapat dicapai lebih baik lagi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penguatan pengawasan dan pembinaan kepada produsen, khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Selain itu juga penguatan pengawasan berbasis kemitraan dengan lintas sektor harus ditingkatkan khususnya untuk pembinaan sarana produksi IRTP yang menjadi domain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sehingga pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kedua hal

tersebut dilakukan karena sebagian besar makanan yang TMS diproduksi oleh IRTP dan Produk Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Sehingga diharapkan dengan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus kepada produsen jumlah makanan yang TMS akan semakin menurun di masa yang akan datang.

**Sasaran Strategi 2.
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram**

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 2 indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua. Untuk tahun 2018 indikator kinerja yang diukur hanya satu indikator yaitu Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60,0	49,73	82,88	cukup
	Indeks kesadaran masyarakat (Awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	-	-	-	-
NPS				82,88	cukup

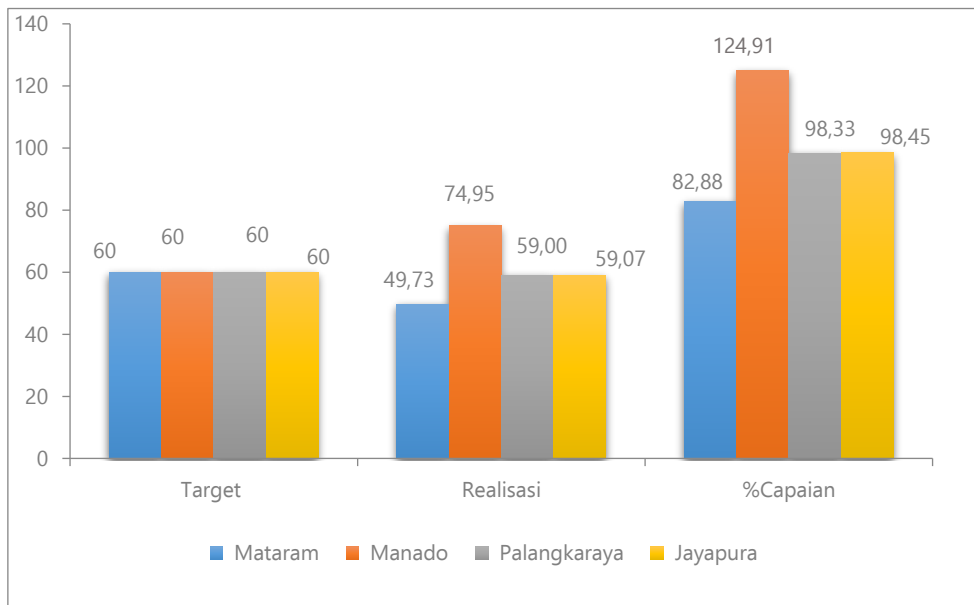
Kepatuhan pelaku usaha merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non-profit dari pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup sarana produksi dan distribusi. Pelaku usaha harus memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain:

- Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP);
- Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); dan
- Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan.

Untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks pada indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP). Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BBPOM di Mataram pada tahun n-1, sehingga capaian tahun 2018 merupakan hasil olahan data kepatuhan pada tahun 2017.

Realisasi indikator Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2017 adalah sebesar 49,73% dengan target 60,0% (sama dengan target nasional). Sehingga diperoleh capaian indeks sebesar 82,88% dengan kriteria cukup. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 (61,0%) maka target tersebut baru tercapai sebesar 81,52% di tahun 2018.



Gambar 3.13 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian indeks kepatuhan (*compliance index*) BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Capaian BBPOM di Mataram tahun 2018 (82,88%) jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (124,91%), BBPOM di Palangkaraya (98,33%) dan BBPOM di Jayapura (98,45%), menunjukkan bahwa hanya BBPOM di Manado yang mencapai target (capaian >100%) dengan kriteria memuaskan, sedangkan BBPOM di Mataram, BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura belum mencapai target (capaian <100%) dengan kriteria cukup. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram perlu meningkatkan kinerja agar indeks kepatuhan (*compliance index*)

pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang relatif rendah di tahun ini dapat dicapai lebih baik lagi pada tahun yang akan datang.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penguatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi NTB serta meningkatkan pembinaan yang terus menerus kepada pelaku usaha baik produsen maupun distributor Obat dan Makanan di Provinsi NTB. Selain itu BBPOM di Mataram harus meningkatkan pengawasan yang berbasis kemitraan dengan lintas sektor, khususnya untuk sarana produksi maupun distribusi yang menjadi domain pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kedua hal tersebut diharapkan akan dapat mengurangi jumlah sarana produksi maupun distribusi Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada sasaran strategis 2 digambarkan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS2

No	Indikator Kinerja	BBPOM di Mataram	BPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
1	Indeks kepatuhan (<i>Compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82,88	124,92	98,33	98,45
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	-

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Pada Sasaran Strategis ini hanya terdapat 1 indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018

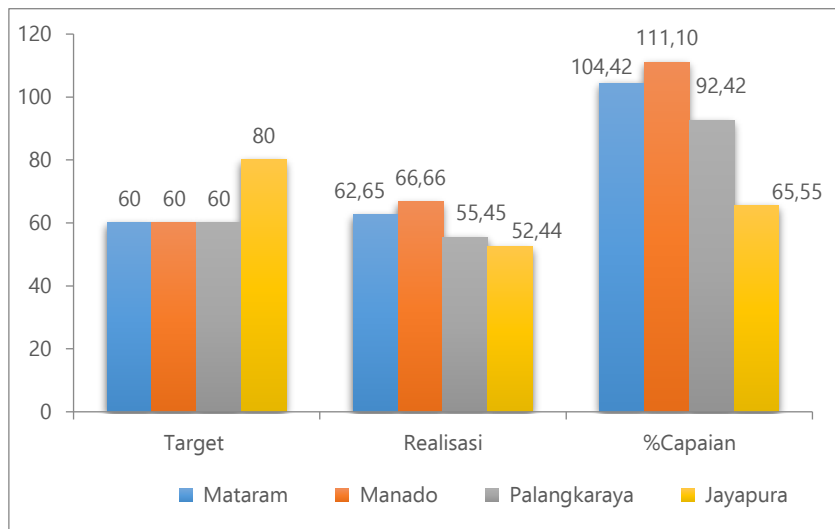
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60,0	62,65	104,42	memuaskan

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan BBPOM di Mataram. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat menggunakan metodologi survei (dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) bekerjasama dengan biro HDSP) Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BBPOM di Mataram pada tahun 2018.

Realisasi indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2018 adalah sebesar 62,50% dengan target 60,0% (sama dengan target nasional). Sehingga diperoleh capaian indeks sebesar 104,42% dengan kriteria memuaskan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Provinsi NTB dalam memilih Obat dan Makanan dengan benar telah cukup baik.

Capaian tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2018 terus meningkatkan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal. Antara lain dengan program KIE yang telah dilaksanakan sebanyak 72 kali melalui Sarasehan Pembinaan UMKM Pangan Olahan, KIE melalui Penyebaran Informasi, Bimtek/Penyuluhan UMKM Pangan Olahan/PIRT, Sosialisasi Obat dan Makanan melalui KIE Bersama Tokoh Masyarakat serta menjadi narasumber pada kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektor. Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi langsung dari BBPOM di Mataram sebanyak 6280 orang.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 (61,0%) maka target tersebut telah terlampaui sebesar 102,46% di tahun 2018.



Gambar 3.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Mataram dengan BBPOM Lainnya

Capaian BBPOM di Mataram tahun 2018 (104,42%) jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (111,10%), BBPOM di Palangkaraya (92,42%) dan BBPOM di Jayapura (65,55%). Hal ini menunjukkan bahwa capaian BBPOM di Mataram dan BBPOM di Manado telah melampaui target

2018 bahkan target 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Provinsi NTB dan Sulawesi Utara dalam memilih Obat dan Makanan dengan benar relatif lebih baik dibanding dengan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua.

Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada sasaran strategis 3 digambarkan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS3

Indikator Kinerja	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	104,42	111,1	92,42	65,55



**Sasaran Strategis 4.
Meningkatnya efektivitas
Pengawasan Obat dan
Makanan berbasis risiko di
Provinsi Nusa Tenggara
Barat**

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 5 indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis keempat ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	100,00	Baik
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	45,00	54,49	121,09	Memuaskan
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	45,00	63,12	140,27	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	75	84,62	112,83	Memuaskan
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM	40	40,58	101,45	Memuaskan
	NPS			115,13	Memuaskan

Pada tahun 2018, capaian BBPOM di Mataram pada SS4 dicapai dengan 3 indikator yang mempunyai capaian dengan kriteria **Memuaskan**, yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Mataram. Selanjutnya 1 indikator yang mempunyai capaian dengan kriteria **Baik** yaitu Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 1 indikator yang mempunyai capaian dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan** yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram, hal ini perlu menjadi bahan kajian penetapan target indikator sasaran strategis 4 pada review RENSTRA yang akan datang, apakah penetapan target pada indikator ini terlalu rendah atau perlu kajian mendalam tentang kondisi sebenarnya pengawasan Obat dan Makanan dengan memperhatikan analisa risiko yang relevan.

Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja SS4 dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS4.

No	Indikator Kinerja	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	92,49	88,91
2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	121,09	156,29	16,13	76,61
3	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	140,27	135,90	64,48	103,35
4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	112,83	117,56	125,93	100
5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	101,45	152,71	110,14	100

Perbandingan capaian indikator BBPOM di Mataram pada SS4 dengan BBPOM lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator presentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2018 nilai capaian BBPOM di Mataram (100,00%) dengan kriteria baik. Nilai capaian tersebut sama dengan capaian BBPOM di Manado (100,%), namun lebih tinggi dari capaian BBPOM di Palangkaraya (92,49%) dan BBPOM di Jayapura (88,91%).
2. Indikator presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram. Pada tahun 2018 nilai capaian BBPOM di Mataram (121,09%) dengan kriteria memuaskan. Nilai capaian tersebut lebih kecil dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (156,29%), namun lebih tinggi dari capaian BBPOM di Palangkaraya (16,13%), dan BBPOM di Jayapura (76,61%).
3. Indikator presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram. Pada tahun 2018 nilai capaian BBPOM di Mataram (140,27%) dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Nilai capaian tersebut lebih tinggi dari capaian BBPOM di Manado (135,90%), BBPOM di Palangkaraya (64,48%), dan BBPOM di Jayapura (103,35%).
4. Indikator presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2018 nilai capaian BBPOM di Mataram (112,83%) dengan kriteria memuaskan. Nilai capaian tersebut lebih kecil dibandingkan capaian BBPOM di Manado (117,56%) dan BBPOM di Palangkaraya (125,93%), namun lebih tinggi dari capaian BBPOM di Jayapura (100,00%).

5. Indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Mataram. Pada tahun 2018 nilai capaian BBPOM di Mataram (101,45%) dengan kriteria memuaskan. Nilai capaian tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (152,71%) dan BBPOM di Palangkaraya (110,14%), namun lebih tinggi dari capaian BBPOM di Jayapura (100,00%).

Analisis capaian dari indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka melindungi masyarakat NTB dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan BBPOM Mataram melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar. Pelaksanaan sampling mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM RI tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2018, sampling dilakukan di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pelayanan kesehatan dan secara online khusus untuk sampel kosmetika.

Pada tahun 2018 dilakukan sampling sebanyak 3.016 sampel dari target 3007 sampel dengan capaian 100,30%. Dari 3.016 sampel tersebut, 2914 sampel hasil sampling yang dilakukan oleh petugas dari BBPOM di Mataram dan sisanya (102 sampel) disampling oleh petugas Loka POM di Kabupaten Bima.

Sebanyak 3.011 sampel diuji di laboratorium dari 3.016 yang disampling karena terdapat 5 sampel tanpa ijin edar (TIE) antara lain 4 sampel kosmetik dan 1 sampel suplemen kesehatan. Seluruh sampel yang diterima di laboratorium telah dilakukan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2018, termasuk 4 sampel rokok yang dilakukan uji rujuk ke BBPOM di Semarang dan BBPOM di Surabaya serta 3 sampel vaksin yang diuji rujuk ke PPPOMN.

Dari 3.011 sampel yang diuji sesuai standar (berdasarkan parameter kritis), terdiri atas

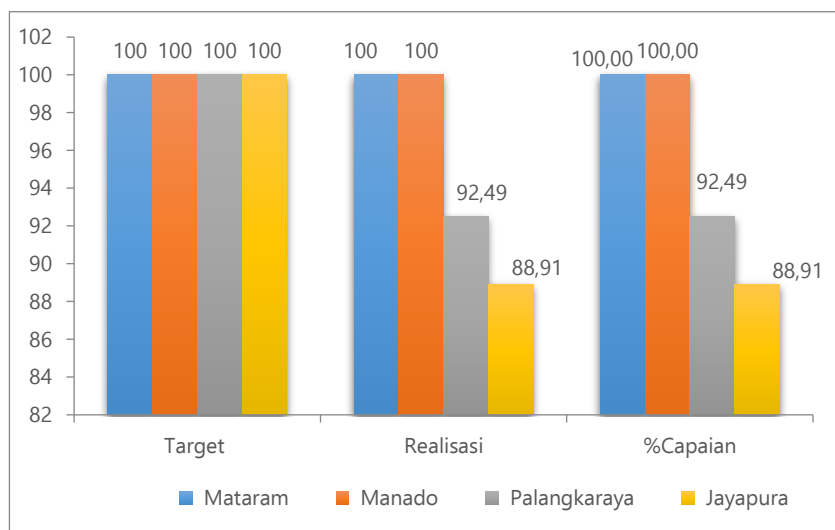
- a. Obat : 602 sampel
- b. Obat Tradisional : 452 sampel
- c. Kosmetik : 899 sampel
- d. Suplemen Kesehatan : 149 sampel
- e. Makanan : 902 sampel

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebesar 100,0% dari target 100,0% dengan capaian indikator (NPI) sebesar 100,0%. Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar} / \text{dibagi sampel yang harus diuji}) \times 100\%$

Realisasi jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 (3.013), 2016 (3.005) dan 2017 (3.009), menunjukkan bahwa semua sampel yang dikirim ke laboratorium diuji menggunakan parameter uji kritis.

Hal-hal yang berkontribusi positif terhadap capaian ini antara lain adanya sinergitas antar bidang terkait yang terlibat dari awal penyusunan prioritas sampling Obat dan Makanan, sinergitas antara petugas sampling BBPOM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima, meningkatnya kompetensi petugas yang melakukan sampling maupun uji di laboratorium sehingga dapat mengimplementasikan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2018 dengan baik, serta tersedianya instrumen yang memadai untuk melakukan uji Obat dan Makanan. Meskipun demikian, BBPOM di Mataram masih perlu meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan terstruktur serta mempertahankan kredibilitas laboratorium dengan berpartisipasi dalam uji kolaborasi dan uji profisiensi.



Gambar 3.15 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian BBPOM di Mataram tahun 2018 (100,0%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan BBPOM di Palangkaraya (92,49%) dan BBPOM di Jayapura (88,91%) serta sama jika dibandingkan terhadap capaian BBPOM di Manado (100,0%). Hal ini menunjukkan bahwa pengujian Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram dan BBPOM di Manado telah sesuai dengan standar.

b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram

Jumlah sarana produksi di wilayah NTB sebanyak 741 sarana, yang terdiri dari sarana produksi pangan (MD dan PIRT), sarana produksi obat tradisional (UKOT dan UMOT) dan tidak ada sarana produksi obat dan kosmetik, sebagian besar merupakan sarana produksi pangan PIRT (95,4%).

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2018 sebesar 54,49 % dari target 45,00 % dengan capaian sebesar 121,09%. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis resiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan MD dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

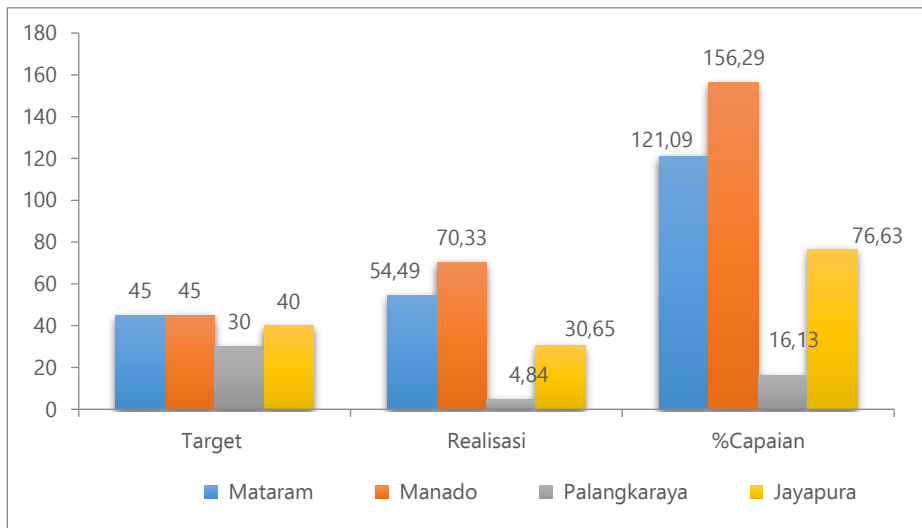
Target pemeriksaan sarana produksi sebanyak 327 sarana terealisasi sebanyak 312 sarana (95,41 %) dengan hasil 142 sarana (45,51%) TMK dan 170 sarana (54,49%) MK. Masih banyaknya sarana produksi yang TMK menunjukkan bahwa masih kurangnya komitmen dari pelaku usaha untuk secara konsisten mempertahankan Cara Produksi yang Baik sesuai dengan produk yang mereka edarkan seperti saat mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin edar.

Realisasi jumlah sarana produksi yang diperiksa tidak mencapai target disebabkan karena adanya kejadian force majeure (gempa bumi) yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pengawasan untuk sementara waktu dan sebagian sarana terutama sarana yang terkena dampak langsung gempa bumi belum bisa beroperasi kembali sebagaimana biasanya.

Temuan bahan berbahaya dalam produk pangan IRTP masih didominasi penggunaan boraks (dalam produk kerupuk), sedangkan penggunaan pewarna dilarang Rhodamin B sudah menurun. Masih tingginya penggunaan Boraks dalam kerupuk disebabkan oleh belum adanya tindakan tegas dari pemerintah Kab/Kota untuk melarang masuknya pangan mengandung bahan berbahaya ke wilayah masing - masing, serta belum adanya regulasi untuk menolak masuknya pangan yang mengandung bahan berbahaya ke wilayahnya.

Meskipun indikator Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan tercapai dengan kriteria memuaskan, pengawasan harus lebih diintensifkan untuk mendorong pelaku usaha memenuhi ketentuan cara produksi yang baik, baik untuk produk makanan kemasan olahan, pangan IRTP maupun produk obat tradisional lokal sehingga bisa memiliki daya saing yang lebih baik. Komitmen pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga kesinambungan sinergi program pengawasan Obat dan Makanan perlu terus dibina.

Indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram ini merupakan indikator baru, sehingga realisasi dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2018 (54,49%) bila dibandingkan dengan target 2019 (50,0%) dan target nasional (35,88%), masing-masing capaiannya telah terlampaui sebesar 109,98% dan 195,51%.



Gambar 3.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian BBPOM di Mataram tahun 2018 (121,09%) jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (156,29%), BBPOM di Palangkaraya (16,13%) dan BBPOM di Jayapura (76,61%) menunjukkan bahwa BBPOM di Manado dan BBPOM di Mataram mencapai target (capaian >100%) dengan kriteria memuaskan, sedangkan BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura belum mencapai target (capaian <100%) masing-masing dengan kriteria kurang dan kriteria cukup.

c. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Pemeriksaan sarana distribusi bertujuan untuk memastikan kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi yang Baik oleh sarana guna menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk Obat dan Makanan diperedaran.

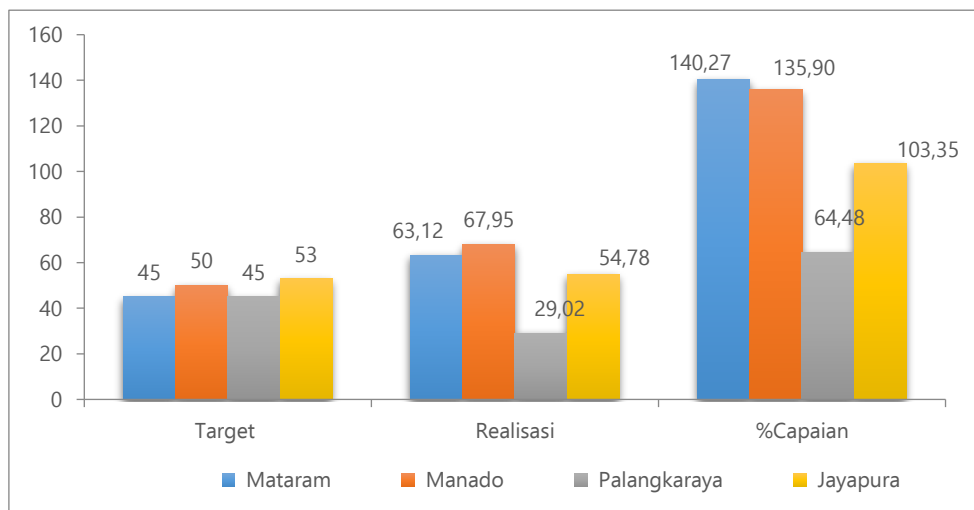
Jumlah sarana distribusi di wilayah Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebanyak 4998 (5010) sarana (menurun dari tahun 2017, sebanyak 12 sarana sudah tidak beroperasi lagi) meliputi sarana distribusi obat (IFK dan PBF), pelayanan obat (RS, Klinik, Puskesmas, Pustu, Apotek, Toko Obat), distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, distribusi pangan dan kosmetik baik retail modern maupun tradisional.

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2018 sebesar 63,12 % dari target 45,00% atau tercapai sebesar 140,27% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan terpadu dengan lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi dan lintas sektor lainnya, antara lain kegiatan intensifikasi pengawasan keamanan pangan dalam rangka hari besar keagamaan dan perayaan tahun baru 2019 serta kegiatan terpadu lainnya bersama Dinas Perdagangan Provinsi dalam rangka perlindungan konsumen.

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari persentase jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibanding jumlah sarana distribusi yang diperiksa.

Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan mencakup seluruh Kab/Kota di wilayah NTB, dari target sebanyak 1250 sarana terealisasi sebanyak 1399 sarana (111,92 %), dengan hasil 883 (63,12%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 516 (36,88%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Realisasi pengawasan sarana distribusi melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini sebagai akibat adanya tambahan hasil pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dari Loka POM di Kabupaten Bima.

Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga realisasi dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun Realisasi tahun 2018 (63,12%) bila dibandingkan dengan target 2019 (50,0%), maka capaiannya telah terlampaui sebesar 126,24% di tahun 2018. Demikian pula dengan target nasional (46,81%) telah tercapai sebesar 134,84%.



Gambar 3.17 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian BBPOM di Mataram tahun 2018 (140,27%) jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (135,90%), BBPOM di Palangkaraya (64,48%) dan BBPOM di Jayapura (103,35%) menunjukkan bahwa hanya BBPOM di Palangkaraya yang belum mencapai target (capaian <100%) kriteria kurang, BBPOM di Mataram dan BBPOM di Manado mencapai target dengan capaian (capaian >125%) dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, sedangkan BBPOM di Jayapura mencapai target dengan capaian (>100.0%) dengan kriteria memuaskan.

d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 adalah 84,62% dari target 75,0% atau tercapai sebesar 112,83% dengan kriteria memuaskan. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan:

Nilai Persentase: $(\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu} \div \text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya}) \times 100\%$

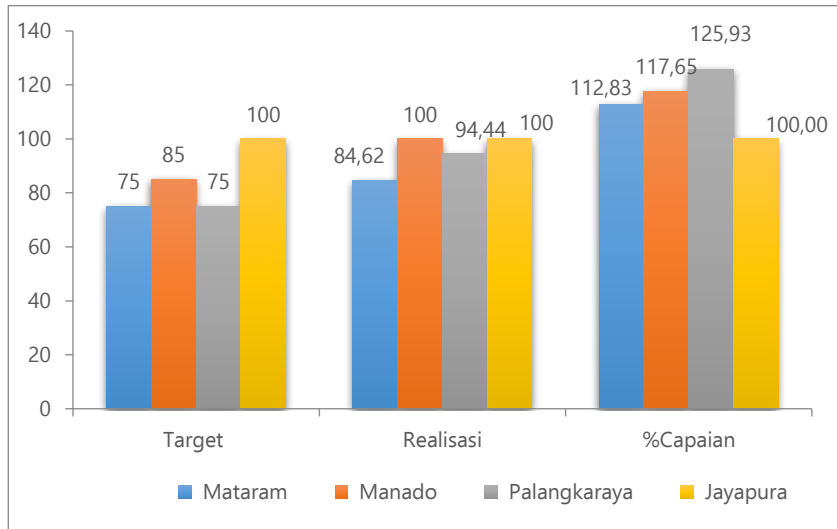
Beberapa kegiatan yang menunjang capaian indikator ini, antara lain:

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima untuk pendaftaran produk pangan olahan kepada pelaku usaha
- b. Pendampingan pendaftaran kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Ijin Edar (NIE) yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Pada tahun 2018 keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu yaitu sesuai time line yang telah ditetapkan dalam SOP, sejumlah 22 keputusan dari 26 permohonan penilaian yang diterima dan dilaksanakan. Terdapat empat keputusan penilaian yang melewati time line seluruhnya disebabkan karena lamanya penyampaian tindakan perbaikan (CAPA) dari pelaku usaha karena menyangkut perbaikan bangunan yang belum dilaksanakan. Tidak ada permohonan penilaian sertifikasi yang carry over di tahun 2017.

Sebanyak 22 Keputusan penilaian sertifikasi tahun 2018 yang tepat waktu terdiri dari surat rekomendasi dan penilaian sarana produksi Obat Tradisional (5), penilaian sarana produksi Pangan Olahan dalam proses pendaftaran produk (9), pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB (7).

Realisasi dan capaian dari indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017) karena merupakan indikator baru di tahun 2018. Adapun bila dibandingkan dengan target 2019 (83,0%) dan target nasional (80,91%), maka realisasi tahun 2018 telah tercapai masing-masing sebesar 101,28% dan 104,96%.



Gambar 3.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian keputusan penilaian sertifikat yang terselesaikan tepat waktu di BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian BBPOM di Mataram (112,83%) jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (117,65%), BBPOM di Palangkaraya (125,93%) dan BBPOM di Jayapura (100,0%) menunjukkan bahwa keempat BBPOM telah mencapai target (capaian >100%). Tiga BBPOM capaiannya dengan kriteria memuaskan (capaian >100%) yaitu BBPOM di Mataram, BBPOM di Manado dan BBPOM di Palangkaraya, sedangkan BBPOM di Jayapura dengan kriteria baik (capaian = 100%).

e. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Pada tahun 2018 rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram terealisasi sebesar 40,58% dari target 40% atau tercapai 101,45% dengan kriteria memuaskan. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan :

Ratio Tindak Lanjut: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait) x 100%

Beberapa hal yang berkontribusi pada pencapaian memuaskan ini antara lain koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor yang telah berjalan cukup baik, serta pengawasan dan pembinaan yang intensif sehingga mendorong pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

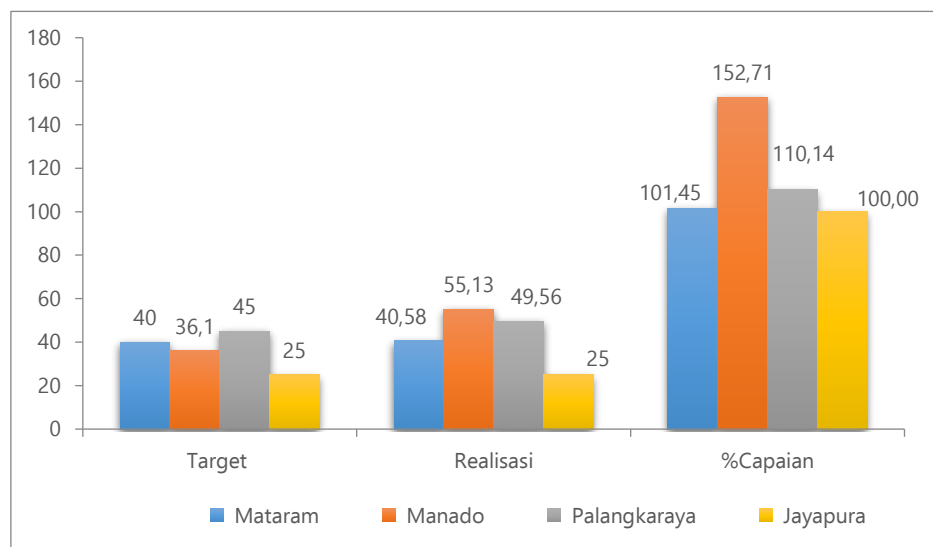
Tindak lanjut merupakan feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait, terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Badan POM, terkait hasil pengawasan yang dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan tindak lanjut kasus.

Jumlah tindak lanjut yang diperoleh selama tahun 2018 sebesar 183 (40,58%) dari 451 rekomendasi yang dikeluarkan, baik atas keputusan Kepala BBPOM di Mataram maupun dari Badan POM. Sebagian besar tindak lanjut yang diperoleh, berasal dari pelaku usaha yaitu sebanyak 125 (27,72%), sedangkan sebanyak 58 (12,86%) feedback berasal dari lintas sektor terkait.

Tabel. 3.16 Jumlah Rekomendasi dan tindak lanjut tahun 2018

No	Komoditi	Jumlah		%
		Rekomendasi	Tindak Lanjut	
1.	Obat	254	162	63,78
2.	Obat Tradisional	12	5	41,67
3.	Pangan	185	16	8,65
TOTAL		451	183	40,58

Realisasi dan capaian dari indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017) karena merupakan indikator baru di tahun 2018. Adapun bila dibandingkan dengan target 2019 (50,0%), maka realisasi tahun 2018 baru tercapai sebesar 81,16%. Namun demikian, target nasional (39,72%) telah terlampaui sebesar 102,17%.



Gambar 3.19 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian keempat BBPOM telah mencapai target (> 100%) dengan kriteria memuaskan. Jika dibandingkan dengan BBPOM di Manado dan BBPOM Palangkaraya, maka persentase capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Mataram berada di bawah kedua BBPOM tersebut. Sedangkan jika dibandingkan dengan BBPOM di Jayapura, capaian BBPOM di Mataram berada diatas namun tidak terlalu signifikan dengan selisih hanya 1,45%.

**Sasaran Strategi 5.
Meningkatnya Efektivitas
Penyidikan Tindak Pidana
Obat dan Makanan di
Wilayah Kerja Balai Besar
POM di Mataram**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis kelima adalah Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Balai Besar POM di Mataram. Perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Balai Besar POM di Mataram	60,0	60,0	100,0	Baik

Realisasi Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di tahun 2018 adalah sebesar 60,0% dari target 60,0% atau tercapai sebesar 100,0% dengan kriteria baik. Hasil tersebut diperoleh dengan perhitungan:

$$\% \text{ Perkara hingga tahap II} = \frac{\text{jumlah perkara tahap 2 tahun n dan tahun n-1}}{\text{Total perkara ditahun n dan tahun n-1}} \times 100\%$$

Perkara Tahun n-1 adalah perkara yang *carry over* di tahun sebelumnya

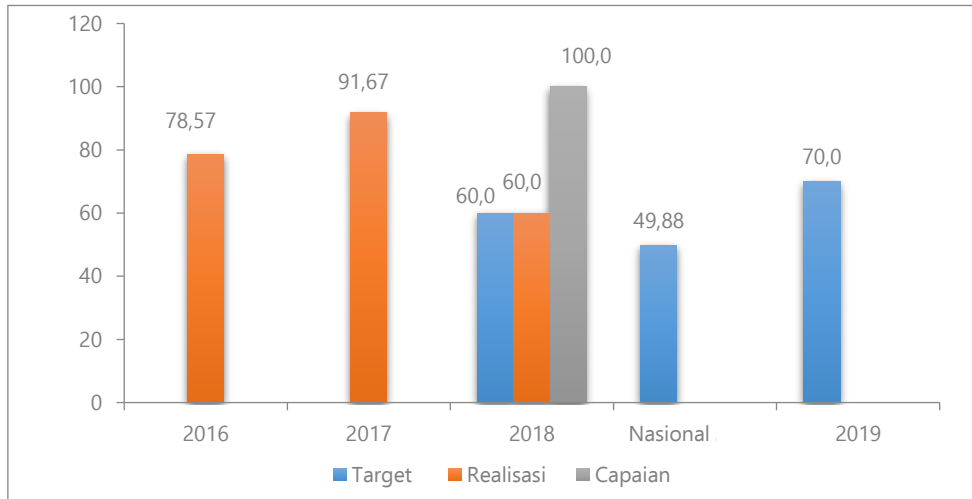
Tindak pidana di bidang Obat dan Makanan Tahun 2018 yang ditindaklanjuti secara pro justitia sebanyak 10 perkara dengan jumlah perkara yang sudah selesai hingga tahap II sebanyak 6 perkara (3 perkara terkait obat ilegal, 2 perkara terkait obat tradisional TIE dan 1 perkara terkait pangan) dan tidak terdapat perkara yang carry over di tahun 2017. Adapun posisi perkara selengkapny adalah 9 perkara sudah P-21 dan tahap persidangan (3 kasus menunggu tahap II, 4 kasus sudah tahap persidangan, 2 sudah mendapatkan putusan/vonis) sementara 1 kasus masih proses pemberkasan.

Dari segi penyelesaian berkas perkara yang ditangani pada tahun 2018 ini tidak mengalami kendala. Dari 9 perkara yang sudah P21 hanya 1 perkara yang pernah P-18/P-19, sementara 8 perkara yang lainnya semua langsung P21, hal ini menunjukkan bahwa kualitas berkas yang dikerjakan oleh Penyidik BBPOM sudah baik dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan) sudah baik. Selanjutnya kondisi yang sudah baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Jumlah perkara yang ditindaklanjuti secara pro justisia tahun 2018 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 (9 perkara) dan tahun 2016 (9 perkara). Hal ini disebabkan karena maraknya kasus peredaran obat ilegal di Nusa Tenggara Barat dan untuk mendukung aksi nasional pemberantasan obat ilegal yang sudah dicanangkan oleh Presiden pada pertengahan tahun 2017. Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Mataram dilakukan berdasarkan analisis resiko dan mempertimbangkan sumber daya manusia di bidang penindakan serta berpedoman pada target Renstra 2015-2019.

Untuk mencapai target perkara pada tahun 2018 Balai Besar POM di Mataram telah melakukan Operasi Gabungan Daerah dan Makanan Ilegal dan Operasi Gabungan Nasional.





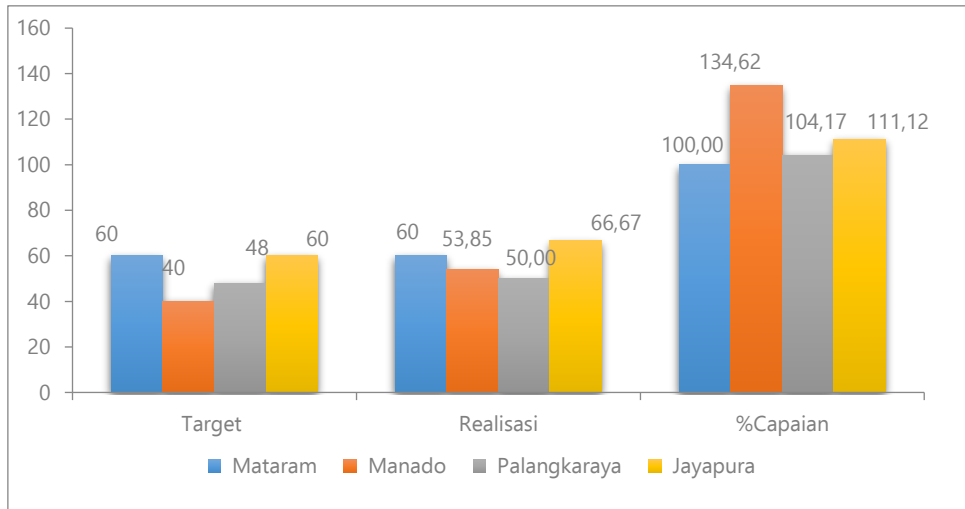
Gambar 3.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Presentase Perkara hingga tahap II

Realisasi persentase perkara pengawasan Obat dan Makanan yang diselesaikan sampai dengan tahap II pada tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan, realisasi tahun 2016 (78,57%) dan tahun 2017 (91,67%), hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 ini sejak akhir bulan November 2018, jaksa penuntut umum tidak menerima pelimpahan tahap II dikarenakan perkara sudah menumpuk di pengadilan dan adanya libur serta cuti di bulan Desember 2018, sedangkan saat itu tiga perkara statusnya sudah P21 dan siap untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2018 (49,88%) maka target tersebut telah terlampaui sebesar 120,29%. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2019 (70,0%) maka target tersebut baru tercapai sebesar 85,71% di tahun 2018, sehingga target 2019 tersebut masih relevan dan optimis dapat dicapai.

BBPOM di Mataram melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan peserta PPNS Balai Besar POM di Mataram, Kepolisian Resort Kab/Kota se-Provinsi NTB, Kejaksaan Negeri se-Provinsi NTB serta PPNS di Lingkup Pemerintah Daerah dan Pusat;
2. Perkuatan jaringan kerjasama dengan POLDA NTB dan dalam bentuk penyidikan bersama dengan Direktorat Narkoba dan Dirreskrimsus POLDA NTB.(wujud pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kabareskrim dengan Kepala Badan POM RI);
3. Pembentukan Tim Respon Cepat Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018;
4. Pembuatan daftar kontak penghubung/*single point of contact* (SPOC) penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar. 3.21 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian presentase perkara hingga tahap II BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian keempat BBPOM telah mencapai target dimana BBPOM di Manado, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura melampaui target (>100%). Meskipun capaian BBPOM di Mataram berada dibawah tiga BBPOM lainnya, namun hal itu tidak menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Mataram lebih rendah. Faktor penyebab adalah target yang ditetapkan oleh BBPOM di Mataram (60%) lebih tinggi dibanding BBPOM di Manado (40%) dan BBPOM di Palangkaraya (48%). Sedangkan jika dibandingkan dengan target BBPOM di Jayapura yang sama dengan target BBPOM di Mataram, maka perlu upaya yang lebih intens dalam meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Tabel 3.18 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SSS

Indikator Kinerja	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Balai Besar POM di Mataram	100,00	134,62	104,17	111,12



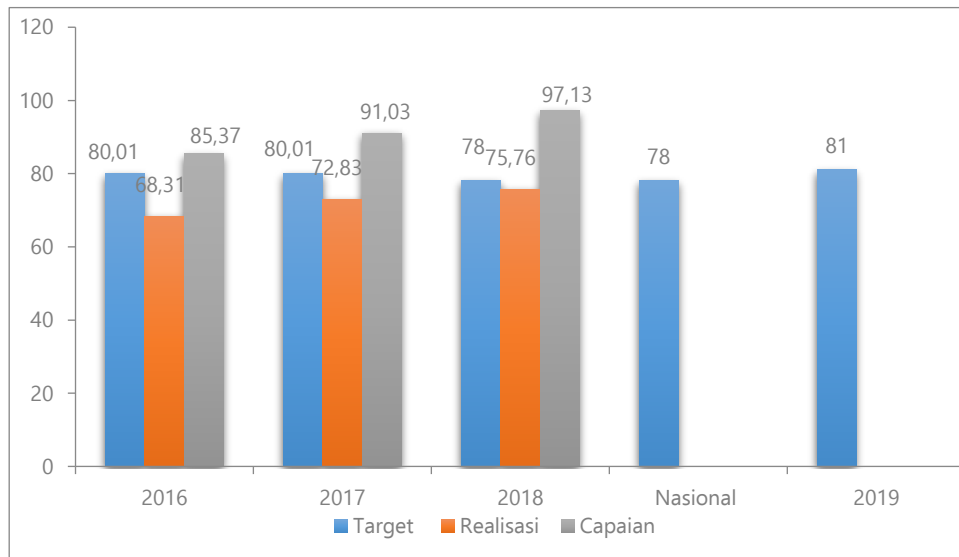
**Sasaran Strategi 6.
Terwujudnya RB BBPOM di
Mataram sesuai roadmap
RB BPOM 2015-2019**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis keenam adalah Nilai AKIP BBPOM di Mataram. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan syarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Mataram adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemetasi SAKIP yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3.19 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya RB BBPOM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	78,0	75,76	97,13	cukup



Gambar 3.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram

Tahun 2018 realisasi nilai AKIP BBPOM di Mataram sebesar 75,76 dari target 78,0 sehingga diperoleh capaian sebesar 97,13% dengan kriteria cukup. Dari hasil evaluasi SAKIP teridentifikasi beberapa kelemahan yaitu belum dilakukannya secara rutin evaluasi internal setiap bulan atau minimal setiap triwulan, mendokumentasikan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kedepan akan dilakukan perbaikan terhadap kelemahan tersebut.

Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan, BBPOM di Mataram telah berhasil memperbaiki komponen Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja yang pada hasil evaluasi sebelumnya mendapatkan nilai rendah.

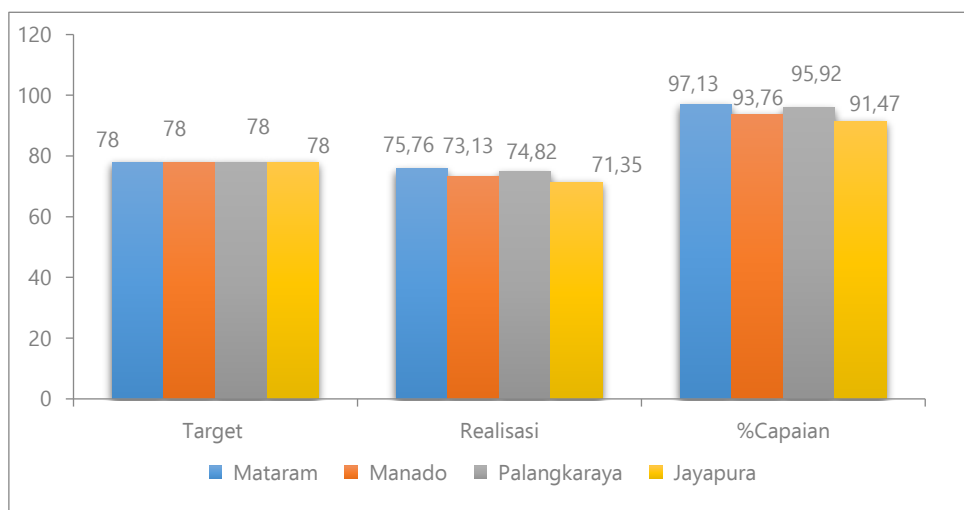
Realisasi nilai AKIP tahun 2018 (75,76) jika dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2016 (68,31) dan tahun 2017 (72,83), maka terdapat kenaikan penilaian masing-masing sebesar 7,45 poin dan 2,93 poin serta secara signifikan mampu menempatkan BBPOM di Mataram ke peringkat 3 dari 32 Balai Besar/Balai POM se-Indonesia yang dilakukan evaluasi penerapannya oleh APIP Badan POM.

Jika dibandingkan dengan target nasional (78,0), maka target tersebut baru tercapai 97,13%. Demikian pula dengan target tahun 2019 (81,0%) baru tercapai sebesar 93,53% di tahun 2018.

Hal-hal yang berkontribusi positif pada capaian Sasaran Strategis 3 antara lain:

- *Up dating* basis data sehingga relevan/sesuai kondisi terkini sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja;
- Pendokumentasian secara tertib hasil *review* Indikator Kinerja Utama/IKU;
- Pemanfaatan hasil evaluasi capaian IKU sebagai dasar penilaian kinerja, pemberian *reward* dan *punishment*;
- Telah ada inisiasi untuk melakukan penjabaran IKU BBPOM di Mataram sampai dengan tingkat individu pegawai yang terus berproses sampai dengan saat ini;
- Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi pelaporan, yang dibangun oleh Badan POM RI dan saat ini terus dilakukan pengembangan sehingga dapat mengintegrasikan kinerja keuangan dan penilaian kinerja individu (*SKP on line* dan *e-performance*);
- Adanya evaluasi secara tertib atas informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi *cost per outcome*; dan
- Secara konsisten menerapkan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan.

Komitmen melakukan perbaikan tersebut secara positif berpengaruh pada tren capaian Sasaran Strategis 6 dalam tiga tahun terakhir yang selalu meningkat.



Gambar 3.23 Perbandingan Target, Realisasi, dan % Capaian Nilai AKIP BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya

Capaian BBPOM di mataram tahun 2018 (97,13%) lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado (93,76%), BBPOM di Palangkaraya (95,92%) dan BBPOM di Jayapura (91,47%). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di BBPOM Mataram telah berjalan dengan cukup baik jika dibandingkan dengan tiga BBPOM lainnya. Meskipun demikian, BBPOM di Mataram harus terus bekerja keras dan melakukan inisiatif perbaikan kinerja agar capaian indikator SS6 dapat memenuhi target di tahun berikutnya.

Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada sasaran strategis 6 digambarkan pada tabel 3.20.

Tabel 3.20 Perbandingan capaian BBPOM di Mataram dengan BBPOM lainnya pada Indikator Kinerja pada SS6

Indikator Kinerja	BBPOM di Mataram	BBPOM di Manado	BBPOM di Palangkaraya	BBPOM di Jayapura
Nilai AKIP Balai Besar POM	97,13	93,76	95,92	91,47



B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran kegiatan BBPOM di Mataram TA 2018 sesuai DIPA nomor SP DIPA-063.01.2.432960/2018 tanggal 5 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 36.101.836.000,-, dan terealisasi sebesar 31.575.960.479,- (87,46%). Kecilnya realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh adanya alokasi anggaran tambahan untuk kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80% sebesar Rp. 2.707.052.000,- (7,50% dari total pagu anggaran).

Pembayaran selisih anggaran untuk kenaikan tunjangan kinerja masih tercukupi dari revisi/optimalisasi anggaran belanja pegawai tanpa melakukan revisi DIPA dari anggaran tambahan tersebut. Dengan demikian apabila total realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu DIPA dikurangi anggaran tambahan tersebut maka persentase capaian menjadi 94,56%, selain karena hal tersebut, kecilnya realisasi juga disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan semua kegiatan operasional perkantoran selama kurang lebih 2 bulan (Agustus – September) sebagai akibat dari terjadinya musibah gempa bumi di pulau Lombok dan Sumbawa.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 25.923.519.942,- (94,60%) dari pagu sebesar 27.403.767.000,- maka terdapat penurunan sebesar 7,14%. Jika dilihat tren dalam 3 tahun sebelumnya, terdapat kenaikan persentase realisasi anggaran berturut-turut tahun 2015 sebesar 90,21%, 2016 sebesar 93,59% dan 2017 sebesar 94,60% namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 87,46%.

Kemampuan penyerapan anggaran, idealnya juga menjadi indikator perhitungan capaian output serta dampak yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas sehingga pemanfaatan anggaran dapat semakin berkualitas.

Penyerapan anggaran tidak terlepas dari komitmen pimpinan, penanggungjawab kegiatan dan seluruh pegawai BBPOM di Mataram untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu, identifikasi dini kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana dan pemanfaatan evaluasi bulanan capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran termasuk evaluasi oleh pihak eksternal (Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi NTB) sebagai bahan perbaikan kinerja.

Capaian penyerapan anggaran di masing-masing sasaran strategis diatas 90% di sasaran strategis "Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 dengan capaian 85,51%. Salah satu output kegiatan yang menunjang penyerapan di sasaran strategis tersebut adalah Output Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp.1.325.286.673,- (30,31%) dari pagu sebesar Rp. 4.373.052.000,-. Kecilnya realisasi anggaran pada output ini disebabkan tidak terserapnya anggaran tambahan untuk kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80% yang dialokasikan sementara pada output tersebut. Realisasi anggaran berdasarkan capaian realisasi Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2018 seperti ditunjukkan pada tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21 Realisasi anggaran berdasarkan capaian realisasi Sasaran Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	574.491.000	558.178.413	97,16
		2 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	1.497.932.000	1.429.357.391	95,42
		3 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	1.073.178.000	953.782.576	88,87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Mataram	1 Layanan publik BB/BPOM	1.859.731.000	1.799.797.822	96,78
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	1 Komunitas yang diberdayakan	1.144.620.000	1.074.622.650	93,88
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	1 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	191.132.000	183.797.407	96,16
		2 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	696.777.000	633.668.855	90,94
		3 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	363.642.000	346.027.410	95,16
5	Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	1 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	572.051.000	538.427.114	94,12
		2 jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	129.716.000	117.688.757	90,73
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	1 Sarana prasana sesuai standar	88.000.000	72.366.387	82,23
		2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1.757.107.000	1.651.951.940	94,02
		3 Bangunan/gedung	1.539.237.000	1.249.603.500	81,18
		4 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	4.373.052.000	1.325.286.673	30,31
		5 Penyediaan alat laboratorium	7.413.000.000	7.364.007.255	99,34
		6 Layanan Internal (Overhead)	344.750.000	344.057.000	99,80
		7 Layanan Perkantoran	12.483.420.000	11.933.339.329	95,59

Pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Mataram. Hal ini dapat dipahami karena porsi anggaran Sasaran Strategis 3 mencakup Belanja Pegawai dan operasional perkantoran BBPOM di Mataram, dan juga dimaksudkan untuk pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana serta alat-alat laboratorium, baik yang dilakukan melalui proses lelang maupun pengadaan langsung.

Dengan adanya Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja, maka dilakukan review renstra 2015-2019 sehingga terdapat perubahan jumlah sasaran strategis yang awalnya dari 3 sasaran strategis menjadi 6 sasaran strategis. Sebelum review Renstra pada tahun 2018, sasaran strategis Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Mataram sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 merupakan Sasaran Strategis 3, yang kemudian berubah menjadi sasaran strategis 6 setelah dilakukan review Renstra BPOM 2015-2019.

Alokasi anggaran sasaran ini mencakup alokasi belanja pegawai, operasional perkantoran dan pemenuhan sarana prasarana kantor. Alokasi anggaran pengadaan barang/jasa terbesar pada tahun 2018 adalah Pengadaan Alat Laboratorium, dan Pekerjaan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gedung Pasca Gempa dengan total realisasi Rp. 8.613.610.755,- atau sebesar 23,86%. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BBPOM di Mataram selama tahun 2018 dapat dikatakan relatif lebih baik daripada tahun 2017. Hal ini terlihat dari proses lelang telah dilaksanakan sejak awal tahun sehingga paket pengadaan yang direncanakan dapat direalisasikan seluruhnya. Realisasi Belanja Modal mempunyai kontribusi tertinggi dalam penyerapan anggaran baik bersumber Rupiah Murni maupun PNP (96,06%), yang turut berpengaruh secara positif menggerakkan roda perekonomian nasional.

Realisasi anggaran BBPOM di Mataram (87,46%) lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi BBPOM di Manado (94,28%), dan BBPOM di Jayapura (88,97%) serta lebih tinggi dari BBPOM di Palangkaraya (80,25%).



Analisis Efisiensi Kegiatan

Upaya melaksanakan kegiatan secara efisien merupakan hal penting untuk dipertimbangkan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan kinerja agar perlindungan kepada masyarakat NTB juga semakin optimal. Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar.

Tahun 2018, BBPOM di Mataram memiliki 17 kegiatan, dimana seluruhnya memperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) lebih besar dari 1 (TE positif/Efisien). Pengukuran Efisiensi Kegiatan diperoleh dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), sesuai dengan rumus disamping.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan % rencana capaian output terhadap % rencana capaian input dengan nilai SE = 1, sesuai rumus berikut:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Pencapaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE sebagai berikut:

- Jika IE sama/lebih besar SE, maka kegiatan tersebut dianggap efisien
- Jika IE lebih kecil SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE). Dari hasil pengukuran menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan suatu kegiatan dengan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dari perhitungan tingkat efisiensi menggunakan rumus diatas, didapatkan hasil semua kegiatan yang ada di BBPOM di Mataram dikategorikan Efisien, sehingga disimpulkan bahwa BBPOM di Mataram dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Efisien. Hal ini terlihat dari perhitungan Indeks Efisiensi (IE) yang semuanya mendapat nilai lebih besar dari 1. Adapun nilai TE bervariasi dari 0,00 sampai dengan 2,30.



Tabel 3.22 Efisiensi Kegiatan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	97,16	100,22	1,03	1,00	Efisien	0,03
		2 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	95,42	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		3 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	88,87	100,05	1,13	1,00	Efisien	0,13
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Mataram							
		1 Layanan publik BB/BPOM	96,78	99,67	1,03	1,00	Efisien	0,03
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		1 Komunitas yang diberdayakan	93,88	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		1 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	96,16	210,97	2,19	1,00	Efisien	1,19
		2 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	90,94	220,32	2,42	1,00	Efisien	1,42
		3 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	95,16	104,04	1,09	1,00	Efisien	0,09
5	Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan							
		1 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	94,12	125,00	1,33	1,00	Efisien	0,33
		2 jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	90,73	100,00	1,10	1,00	Efisien	0,10

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019							
1		Sarana prasana sesuai standar	82,23	100,00	1,22	1,00	Efisien	0,22
2		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	94,02	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
3		Bangunan/gedung	81,18	100,00	1,23	1,00	Efisien	0,23
4		Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	30,31	100,00	3,30	1,00	Efisien	2,30
5		Penyediaan alat laboratorium	99,34	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
6		Layanan Internal (Overhead)	99,80	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
7		Layanan Perkantoran	95,59	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05



BAB 4.

PENUTUP



A. Kesimpulan

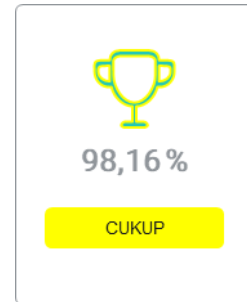
Tahun 2018, BBPOM di Mataram berhasil merealisasikan predikat “Memuaskan” pada SS3 dan SS4, kriteria “Baik” pada SS5 serta kriteria “Cukup” pada SS1, SS2 dan SS6



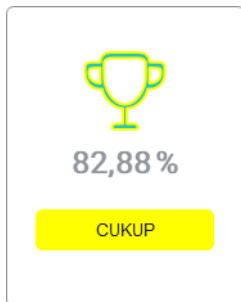
Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra BBPOM di Mataram tahun 2015-2019 dan untuk mencapai tujuan strategis sesuai review Renstra BBPOM di Mataram tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 15 (lima belas) indikator. Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berhasil dicapai dengan NPS 98.16% dengan kriteria **Cukup**;
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram, berhasil dicapai dengan NPS 82.88% dengan kriteria **Cukup**;
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram, berhasil dicapai dengan NPS 104.42% dengan kriteria **Memuaskan**;
4. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berhasil dicapai dengan NPS 115.13%, dengan kriteria **Memuaskan**;
5. Meningkatnya efektivitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram, berhasil dicapai dengan NPS 100.00%, dengan kriteria **Baik**; dan
6. Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, berhasil dicapai dengan NPS 97.13%, dengan kriteria **Cukup**.

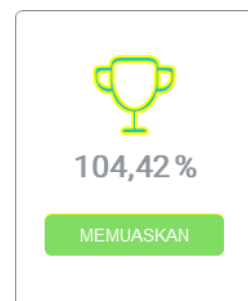
Pada tahun 2018, kinerja BBPOM di Mataram dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat” berhasil dicapai dengan kriteria Cukup (98.16%). Kontribusi terbesar terhadap pencapaian yang kurang optimal yaitu tingginya temuan TMS penandaan/label pada produk obat tradisional sebesar 16% dari total 452 sampel obat tradisional. Untuk itu BBPOM di Mataram akan mendorong kepada Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk memberikan sanksi yang tegas kepada produsen obat tradisional, terkait produk yang TMS penandaan/label.



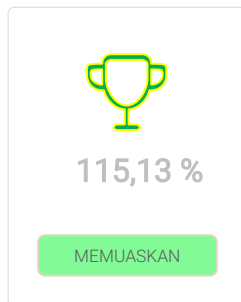
Pada tahun 2018, kinerja BBPOM di Mataram dalam pencapaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram”, berhasil dicapai dengan kriteria Cukup (82.88%). Untuk itu perlu upaya lebih keras dalam mencapai sasaran ini, dengan melakukan pembinaan yang intensif dengan mengevaluasi CAPA yang telah dibuat dan bimbingan terhadap pemenuhan regulasi untuk penerapan CPPB, CPOTB, dan CDOB.



Pada tahun 2018, kinerja BBPOM di Mataram telah berhasil dalam pencapaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram, sehingga diperoleh kriteria pencapaian Memuaskan (104.42%). Keberhasilan pencapaian ditunjang oleh adanya penyebaran informasi Obat dan Makanan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, cetak dan elektronik. Penyebaran informasi Obat dan Makanan secara langsung dan berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada komunitas sekolah, komunitas pasar, komunitas desa dan KIE bersama tokoh masyarakat kepada masyarakat desa maupun kota telah memberikan dampak meningkatnya pengetahuan masyarakat.

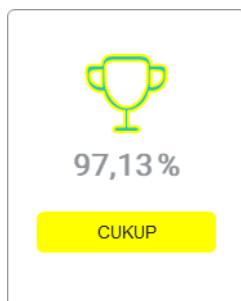
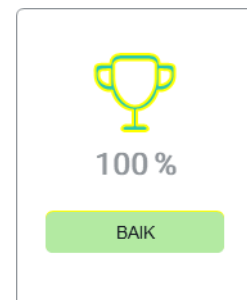


Di tahun 2018, BBPOM di Mataram telah berhasil dalam pencapaian Sasaran Strategis 4 "Meningkatnya efiktifitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga diperoleh kriteria pencapaian Memuaskan (115.13%). Keberhasilan pencapaian ini antara lain ditunjang oleh adanya Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efiktifitas Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan



Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Instruksi Gubernur NTB Nomor 440/321/KUM TAHUN 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu pencapaian juga didukung oleh adanya pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan kepada pelaku usaha, serta komitmen Pemerintah Kab/Kota, pelaku usaha di dalam menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan dari Balai Besar POM di Mataram.

Pada tahun 2018, BBPOM di Mataram berhasil mencapai target capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya efiktifitas Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram" sebesar 100%, sehingga memperoleh kriteria Baik. Untuk mencapai nilai kinerja "Memuaskan" diperlukan usaha peningkatan kompetensi PPNS dan jumlah SDM yang memadai sesuai ABK.



Capaian Kinerja BBPOM di Mataram tahun 2018 untuk sasaran strategis 6 "Terwujudnya RB Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019", berhasil memperoleh capaian (97.13%) dengan kriteria Cukup. Dari hasil evaluasi SAKIP teridentifikasi beberapa kelemahan yaitu belum dilakukannya secara rutin evaluasi internal setiap bulan atau minimal setiap triwulan, mendokumentasikan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kedepan akan dilakukan perbaikan terhadap kelemahan tersebut.

Dari 15 (lima belas) indikator kinerja BBPOM di Mataram, 5 (lima) indikator pencapaiannya Memuaskan (>100%), 2 (dua) indikator pencapaiannya Baik (=100%) dan 7 (tujuh) indikator pencapaiannya Cukup (<100%) serta 1 (satu) indikator tidak dapat disimpulkan (>125%) dengan perincian sebagai berikut:

1. Indeks POM di Balai Besar POM di Mataram 87,29%	CUKUP
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 98,02%	CUKUP
3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat 93,50%	CUKUP
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 107,97%	MEMUASKAN
5. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat 98,55%	CUKUP
6. Persentase makanan yang memenuhi syarat 91,22%	CUKUP
7. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 82,88%	CUKUP
8. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 104,42%	MEMUASKAN
9. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di propinsi Nusa Tenggara Barat 100,00%	BAIK
10. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 121,09%	MEMUASKAN
11. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 140,27%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 112,83%	MEMUASKAN
13. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 101,45%	MEMUASKAN
14. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 100,00%	BAIK
15. Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram 97,13%	CUKUP

Di tahun 2018, PAGU Anggaran BBPOM di Mataram sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah Rp. 36.101.836.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.575.960.479,- (87,46%). Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis "Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019. Tahun 2018, BBPOM di Mataram memiliki 17 kegiatan, dimana seluruhnya memperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) lebih besar dari 1 (TE positif/Efisien), yang berarti semua kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis telah berhasil dilaksanakan secara efisien.

B. Saran

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB, guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global, BBPOM di Mataram harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan melalui strategi:



LAMPIRAN



Lampiran 1


Renstra Balai Besar POM di Mataram Tahun 2015-2019

SASARAN STRATEGIS/ PROGRORAM/KEGIATAN/ (INDIKATOR)	Target Kinerja					Alokasi (dalam rupiah)				
	2015	2016	2017 **	2018 *	2019 *	2015	2016	2017	2018	2019
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram										
SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					4,982,424,000	5,381,017,920	5,811,499,354	6,276,419,302	6,778,532,846
1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	92.00	92.50	93.00	97.50	98.00				
1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	70.00	71.00	82.00	84.00	85.00				
1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00				
1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79.00	80.00	81.00	92.00	93.00				
1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00	81.00	89.10	92.00	93.00				
SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat					5,677,616,000	6,131,825,280	6,622,371,302	7,152,161,007	7,724,333,887
2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.50	83.00	83.50	84.00	84.50				
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	5	6	10	11	11				
SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BADAN POM					9,684,807,000	16,591,416,840	17,918,730,187	19,352,228,602	20,900,406,890
3.1	Nilai SAKIP dari Badan POM	80.01	80.01	80.01	73.00	74.00				

SASARAN STRATEGIS/ PROGRORAM/KEGIATAN/ (INDIKATOR)	Target Kinerja					Alokasi (dalam rupiah)				
	2015	2016	2017 **	2018 *	2019 *	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Mataram						20,344,847,000	21,972,434,760	23,730,229,541	25,628,647,904	27,678,939,736
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia										
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.000	3.000	3.007	3.000	3.000	2,951,901,000	3,188,053,080	3,443,097,326	3,718,545,113	4,016,028,722
2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	100	100	100	100	100	26,456,000	28,572,480	30,858,278	33,326,941	35,993,096
3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	41	42	43	44	45	202,310,000	218,494,800	235,974,384	254,852,335	275,240,521
SASARAN STRATEGIS/ PROGRORAM/KEGIATAN/ (INDIKATOR)	Target Kinerja					Alokasi (dalam rupiah)				
	2015	2016	2017 **	2018 *	2019 *	2015	2016	2017	2018	2019
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	24	25	25	25	1,103,605,000	1,191,893,400	1,287,244,872	1,390,224,462	1,501,442,419
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	8	8	8	9	9	698,152,000	754,004,160	814,324,493	879,470,452	949,828,088
6 Jumlah layanan publik	825	850	875	900	925	4,557,076,000	4,921,642,080	5,315,373,446	5,740,603,322	6,199,851,588
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	7	10	35	40	45	1,120,540,000	1,210,183,200	1,306,997,856	1,411,557,684	1,524,482,299
8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	80	82	84	86	88	9,142,633,000	9,874,043,640	10,663,967,131	11,517,084,502	12,438,451,262
9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9	10	9	10	542,174,000	585,547,920	632,391,754	682,983,094	737,621,741

Lampiran 2

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/U LPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR POM DI MATARAM
Nomor : HK.06.02.117.12.17.2244A

TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BALAI BESAR POM DI MATARAM
TAHUN 2018

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, maka setiap instansi pemerintah harus menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;

b. bahwa telah terjadi perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal sehingga diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

c. bahwa dalam penyusunan Dokumen Kerja dan Anggaran serta Penetapan Kinerja BBPOM di Mataram Tahun Anggaran 2018 diperlukan dasar dokumen perencanaan kinerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 – 2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENNAS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terakhir diubah sesuai Peraturan Badan POM nomor : 12 Tahun 2018 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019;

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM**

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

8. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor HK.07.108A.06.15.0180 Tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Mataram Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI MATARAM TAHUN 2018**
- PERTAMA** : Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018 yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat RKT Balai Besar POM di Mataram berisi gambaran umum pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 meliputi aspek-aspek pengawasan keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya; Produk Terapeutik dan PKRT; Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik; Narkotika, Psikotropika dan Prekursor; pemberdayaan konsumen di bidang Obat dan Makanan; peningkatan kapasitas manajemen; profesionalisme sumber daya manusia; penyidikan dan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan; penguatan kapasitas laboratorium; serta pemantapan jejaring lintas sektor.
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Mataram diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- KETIGA** : Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 1 Desember 2017



Dra. Ni GAY Suarningsih, Apt., MH

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Mataram Tahun 2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt, MH
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Mataram
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Mataram, 5 Oktober 2018

Pihak Pertama



Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt, MH



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.007
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	45
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25
4	Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1000
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	70
		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	97.5
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	84
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat	92
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	60
		Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	-



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	60
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard di Provinsi Nusa Tenggara Barat	100
		1. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	45
		2. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Mataram	45
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat	75
		Ratio tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	40
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram	60	
4	Terwujudnya RB BBPOM di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Mataram	78

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran

Rp. 36.101.836.000

Mataram, 05 Oktober 2018

Pihak Kedua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama



Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt, MH

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	TARGET				REALISASI			
					B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Propinsi Nusa Tenggara Barat	1. Indeks POM di Balai Besar POM di Mataram	70,00				70,00				
			2. Persentase obat yang memenuhi syarat	97,50				97,50				
			3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84,00				84,00				
			4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00				92,00				
			5. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	92,00				92,00				
			6. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00				92,00				
2	Customer	Meningkatnya keputusan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	1. Indeks keputusan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60,00				60,00				
			2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	-				-				
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60,00				60,00				
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Propinsi Nusa Tenggara Barat	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di propinsi Nusa Tenggara Barat	100,00				100,00				
			2. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	45,00				45,00				
			3. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	45,00				45,00				
			4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	75				75				
			5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	40				40				
			Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60				60			
4	Learning & Growth	Terwujudnya Reformasi Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB Badan POM RI 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram	78				78				

Mataram, 5 Oktober 2018
 Kepala Balai Besar POM di Mataram

 Dra. Ni Greva Sariingsih, Apt, MHI

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Mataram

**PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Porpinsi Nusa Tenggara Barat	• Indeks POM di Balai Besar POM di Mataram	70,00	61,10	87,29
			• Persentase obat yang memenuhi syarat	97,50	95,57	98,02
			• Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84,00	78,54	93,50
			• Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	99,33	107,97
			• Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	92,00	90,67	98,55
			• Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00	83,92	91,22
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	• Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60,00	49,73	82,88
			• Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	-	-	-
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	• Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	60,00	62,65	104,42

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Propinsi Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di propinsi Nusa Tenggara Barat Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Ratio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram 	60	60,00	100,00
4	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya Reformasi Balai Besar POM di Mataram sesuai roadmap RB Badan POM RI 2015 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram 	78	75,76	97,13

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai Besar POM di Mataram

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Mataram								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	• Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input :					
			Dana	Rp.	574.491.000	Rp.	558.178.413	97,16
			Output:					
			jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	900	Sampel	902	100,22
			Input :					
			Dana	Rp.	1.497.932.000	Rp.	1.429.357.391	95,42
		• Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Input :					
			Dana	Rp.	1.497.932.000	Rp.	1.429.357.391	95,42
			Output:					
			jumlah dokumen teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Dokumen	1	Dokumen	1	100,00
• Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input :							
	Dana	Rp.	1.073.178.000	Rp.	953.782.576	88,87		
	Output:							
	jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	2107	Sampel	2108	100,05		

Laporan Kinerja

BBPOM di Mataram Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Mataram	• Layanan publik BB/BPOM	Input :						
			Dana		Rp.	1.859.731.000	Rp.	1.799.797.822	96,78
			Output:						
			jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	900	Layanan	897	99,67	
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	• Komunitas yang diberdayakan	Input :						
			Dana		Rp.	1.144.620.000	Rp.	1.074.622.650	93,88
			Output:						
			jumlah komunitas yang diberdayakan	Komunitas	40	Komunitas	40	100,00	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	• Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Input :						
			Dana		Rp.	191.132.000	Rp.	183.797.407	96,16
			Output:						
			jumlah cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Sarana	155	Sarana	327	210,97	
		• Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Input :						
			Dana		Rp.	696.777.000	Rp.	633.668.855	90,94
			Output:						
			jumlah cakupan pemeriksaan sarana distribusi OT, kosmetik, SK, dan makanan	Sarana	556	Sarana	1225	220,32	
• Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Input :								
	Dana		Rp.	363.642.000	Rp.	346.027.410	95,16		

Laporan Kinerja

BBPOM di Mataram Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			Output: Jumlah cakupan pengawasansarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Sarana	371	Sarana	386	104,04	
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram	• Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp.	572.051.000	Rp.	538.427.114	94,12	
			Output: Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Perkara	8	Perkara	10	125,00	
		• jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Input : Dana	Rp.	129.716.000	Rp.	117.688.757	90,73	
			Output: jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Laporan	5	Laporan	5	100,00	
			• Sarana prasana sesuai standar	Input : Dana	Rp.	88.000.000	Rp.	72.366.387	82,23
				Output: jumlah pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Sarana	1	Sarana	1	100,00
• Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Input : Dana	Rp.	1.757.107.000	Rp.	1.651.951.940	94,02			
	Output: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	9	Laporan	9	100,00			
	• Bangunan/gedung	Input : Dana	Rp.	1.539.237.000	Rp.	1.249.603.500	81,18		
		Output: luas gedung yang dibangun	M2	3379	M2	3379	100,00		

Laporan Kinerja

BBPOM di Mataram Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%		
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		• Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	Input :							
			Dana		Rp.	4.373.052.000	Rp.	1.325.286.673	30,31	
			Output:							
		Jumlah Balai POM Kabupaten /Kota yang dibentuk	Kabupaten/Kota		3379	Kabupaten/Kota	3379	100,00		
		• Penyediaan alat laboratorium	Input :							
			Dana		Rp.	7.413.000.000	Rp.	7.364.007.255	99,34	
			Output:							
		jumlah alat laboratorium yang diadakan	Unit		25	Unit	25	100,00		
		• Layanan Internal (Overhead)	Input :							
			Dana		Rp.	344.750.000	Rp.	344.057.000	99,80	
			Output:							
		jumlah layanan internal	Kabupaten/Kota		1	Kabupaten/Kota	1	100,00		
		• Layanan Perkantoran	Input :							
Dana			Rp.	12.483.420.000	Rp.	11.933.339.329	95,59			
Output:										
jumlah layanan perkantoran	Layanan		12	Layanan	12	100,00				
	Dana			36.101.836.000		31.575.960.479				

Lampiran 6

Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Mataram

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Mataram								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		• Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	97,16	100,22	1,03	1,00	Efisien	0,03
		• Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	95,42	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		• Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	88,87	100,05	1,13	1,00	Efisien	0,13
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Mataram							
		• Layanan publik BB/BPOM	96,78	99,67	1,03	1,00	Efisien	0,03
3	A. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		• Komunitas yang diberdayakan	93,88	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
	B. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		• Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	96,16	210,97	2,19	1,00	Efisien	1,19
		• Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	90,94	220,32	2,42	1,00	Efisien	1,42
		• Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	95,16	104,04	1,09	1,00	Efisien	0,09
	C. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Mataram							
		• Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	94,12	125,00	1,33	1,00	Efisien	0,33
		• Jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	90,73	100,00	1,10	1,00	Efisien	0,10
4	Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Mataram sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019							
		• Sarana prasana sesuai standar	82,23	100,00	1,22	1,00	Efisien	0,22
		• Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	94,02	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06

No	Sasaran Strategis	Program/KegiatanSub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		• Bangunan/gedung	81,18	100,00	1,23	1,00	Efisien	0,23
		• Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	30,31	100,00	3,30	1,00	Efisien	2,30
		• Penyediaan alat laboratorium	99,34	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		• Layanan Internal (Overhead)	99,80	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		• Layanan Perkantoran	95,59	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05